

**LAPORAN PENELITIAN TAHUN I  
HIBAH BERSAING PERGURUAN TINGGI  
Tahun Anggaran 2007**



**MODEL PEMEKARAN WILAYAH  
YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT**

**Tim Peneliti:**  
**MILWAN, S.Sos, M.Si**  
**Dra. ACE SRIATI RACHMAN, M.Si**  
**Drs. CHANIF NURCHOLIS, M.Si**  
**Drs. TIJAN, M.Si**

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,  
Departemen Pendidikan Nasional, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan  
Hibah Penelitian Nomor : 057/SP2H/PP/DP2M/III/2007, Tanggal 29 Maret 2007

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
PADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TERBUKA  
2007**

## LAPORAN PENELITIAN

Kategori : 1  
 Unsur/Instansi : Universitas Terbuka  
 Peneliti : Milwan, S.Sos, M.Si, dkk.

### Keterangan Umum

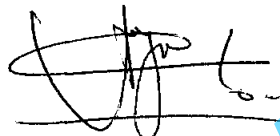
1. Judul : Model Pemekaran Wilayah yang Menyejahterakan Masyarakat  
 2. Jumlah biaya : Rp. 30.000.000,00  
 3. Jangka Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2007  
 4. Personalia :

Nama	Keahlian	Fakultas	PT
Milwan, S.Sos, M.Si	Ilmu Administrasi	FISIP	UT
Dra. Ace Sriati Rachman, M.Si	Ilmu Komunikasi	FISIP	UT
Drs. Chanif Nurcholis, M.Si	Ilmu Administrasi	FISIP	UT
Drs. Tijan, M.Si	Ilmu Administrasi	FIS	UNNES

5. Lokasi Penelitian : Provinsi Banten, Kota Depok Jawa Barat dan Kabupaten Tangerang

Jakarta, 30 November 2007

Mengetahui  
 Dekan FISIP-UT



Dr. Tri Darmayanti  
 NIP. 131866177

Ketua peneliti,



Milwan, S.Sos, M.Si  
 NIP. 132238493

Mengetahui:  
 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat,



Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si

NIP. 133002049

## ABSTRAK

Penelitian pada tahun pertama ini bertujuan: 1) mendeskripsikan alasan logis masyarakat daerah penelitian (yang sudah berhasil melakukan pemekaran dan yang sedang mengajukan pemekaran) menuntut daerahnya untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru, terpisah dari daerah induknya; 2) mendeskripsikan proses politik dan yuridis yang dilakukan Pemda lokasi penelitian untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan pemekaran daerah; dan 3) mendeskripsikan dampak (outcome) pemekaran daerah bagi daerah yang telah berhasil dimekarkan terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan naturalistik/kualitatif. Data diambil melalui studi dokumen, wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan kunci, dan studi pustaka.

Dari hasil analisis diperoleh data sebagai berikut: 1). Pemekaran wilayah atau daerah, baik bagi daerah yang telah berhasil dimekarkan maupun yang sedang mengusulkan pemekaran dipicu adanya acuan normatif yang memberikan peluang untuk pemekaran melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Acuan normatif mendorong elite daerah memekarkan daerahnya dengan alasan demi mempercepat pembangunan, mempermudah pelayanan publik, dan mengakselerasi produktivitas potensi daerah, adanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan materiil dan immateriil, seperti adanya jabatan-jabatan baru di lingkungan eksekutif dan legislatif, proyek-proyek baru sebagai akibat pembangunan gedung-gedung/perkantoran/infra struktur baru, dan pengelolaan dana melalui dana perimbangan (dana bagi hasil dan DAU). 2) Secara teknis proses pemekaran wilayah dilakukan melalui dua prosedur, yaitu prosedur transisi teknokratis (top down) dan prosedur demokratik (bottom up). Pembentukan daerah otonom baru Provinsi Banten dan Kota Depok menggunakan prosedur transisi teknokratis (top down) dan usulan pembentukan Kota Tangerang Selatan yang saat ini sedang diproses di Depdagri merupakan salah satu contoh pemekaran wilayah/daerah yang menggunakan prosedur demokratik (bottom up). 3) Dampak pemekaran wilayah sangat tergantung dari kesiapan daerah yang baru untuk menanggung semua beban administrasi dan birokrasi pemerintahan serta pengelolaan sumber-sumber yang dimilikinya. Pemekaran daerah untuk kasus Provinsi Banten yang memisahkan diri dari induknya, Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok yang memisahkan diri dari induknya Kabupaten Bogor, menunjukkan kinerja yang relatif baik, yaitu cenderung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang mendukung sehingga kedua daerah pemekaran tersebut cenderung berhasil adalah: a) adanya kesiapan lembaga dan b) adanya kesiapan masyarakatnya. Banten dan Depok sebelum menjadi daerah otonom adalah dua wilayah pelayanan pejabat Pembantu Gubernur dan Walikota Administratif. Dengan demikian, dua daerah calon daerah otonom telah terbentuk kelembagaannya. Di samping itu, baik Banten maupun Depok mempunyai struktur masyarakat yang mendukung untuk menjadi kesatuan masyarakat hukum baru. Namun, setelah  $\pm$  7 tahun menjadi daerah otonom baru dan tidak terjadinya konflik antarmasyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten dan Kota Depok masih di bawah tingkat kesejahteraan masyarakat provinsi dan kabupaten induknya. Dengan demikian, tujuan dari pemekaran daerah yang diamanatkan dalam acuan normatif belum tercapai.

**Kata Kunci:** pemekaran wilayah, daerah otonom, kesejahteraan masyarakat

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT kami bisa menyelesaikan laporan penelitian Hibah Bersaing Tahap I /Tahun Anggaran 2007. Laporan penelitian ini adalah laporan tahap I atau tahun I dari usulan penelitian yang telah disetujui selama tiga tahap/tiga tahun anggaran.

Laporan tahap I mendeskripsikan keadaan daerah penelitian, yaitu Provinsi Banten, Kota Depok, dan Kabupaten Tangerang sebagai hasil studi deskriptif atas daerah otonom baru dan calon daerah otonom. Provinsi Banten adalah daerah otonom baru sebagai hasil pemekaran daerah dari Provinsi Jawa Barat. Kota Depok adalah daerah otonom baru sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang semula adalah kota Administratif. Kabupaten Tangerang adalah daerah otonom kabupaten yang pada saat penelitian dilakukan sedang mengusulkan kepada pemerintah untuk bisa dijadikan dua daerah otonom: Kabupaten Tangerang itu sendiri dan Kota Tangerang Selatan. Provinsi Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000. Provinsi Banten semula adalah wilayah kerja Pembantu Gubernur Jawa Barat untuk wilayah Banten yang meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Pada tahun 2000, daerah yang merupakan wilayah kerja Pembantu Gubernur di wilayah Banten tersebut memisahkan diri dari provinsi induk, yaitu Provinsi Jawa Barat dan menjadi daerah otonom baru dengan nama Provinsi Banten.

Kota Depok semula adalah Kota Administratif dengan empat kecamatan, yaitu Kecamatan Pancoranmas, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Beji, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Limo, dan Kecamatan Cimanggis di bawah Kabupaten Bogor. Dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 yang menghilangkan struktur wilayah administrasi maka pada tahun 1999 Kota Administratif Depok dijadikan daerah otonom Kota Depok. Adapun Kabupaten Tangerang sebelum menjadi bagian dari Provinsi Banten adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat. Dengan terbentuknya Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang masuk dalam Provinsi Banten. Kemudian sejalan dengan perkembangan wilayah perkotaan sebagai akibat dari dampak urbanisasi wilayah

Jakarta yang kemudian menciptakan daerah suburban di wilayah bagian utara, yaitu Ciputat, Pamulang, Pondok Aren, Setu, dan Serpong. Masyarakat daerah ini menuntut wilayahnya dijadikan sebagai daerah otonom yang bersifat perkotaan. Pemerintah Kabupaten Tangerang merespon aspirasi tersebut kemudian mengusulkan kepada Pemerintah untuk dapat menjadikan wilayah tersebut sebagai Kota Tangerang Selatan.

Studi deskriptif pada tahun pertama ini menyajikan profil daerah, alasan logis masyarakat menuntut pemekaran, proses pemekaran, baik bagi daerah yang telah berhasil menjadi daerah otonom baru (khusus untuk Provinsi Banten dan Kota Depok) maupun bagi daerah yang sedang mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (Kota Tangerang Selatan). Di samping itu, laporan tahap ini juga menganalisis bagaimana dampak/hasil pemekaran bagi daerah otonom baru (Provinsi Banten dan Kota Depok) terhadap kesejahteraan masyarakat dilihat dari sisi pertumbuhan dan perkembangan sosial, politik, ekonomi, budaya, keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat daerah otonom baru tersebut.

Kepada semua pihak yang membantu suksesnya penelitian ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Kepada para pemerhati yang sudi memberikan masukan dan kritik kami juga mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 November 2007

Tim Peneliti,

## DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>20</b>
A. Metode Penelitian .....	20
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	21
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
A. Kondisi Umum Daerah Penelitian .....	22
B. Pemekaran Eks-Karesidenan Banten Menjadi Provinsi Banten .....	29
C. Pemekaran Kota Administratif Depok Menjadi Kota Depok ....	48
D. Rencana Pemekaran Daerah Kota Tangerang Selatan .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Banten Tahun 2006 –2009 (Ribu).....	23
Tabel 2	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia di Kota Depok 2006 .....	25
Tabel 3	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2010-2015 (Jiwa)	26
Tabel 4.a	PDRB Provinsi Banten atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Tahun 2003-2005 (dalam ribuan Rupiah).....	35
Tabel 4.b	PDRB Provinsi Jawa Barat atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Tahun 2003-2005 (dalam ribuan Rupiah)....	36
Tabel 5	Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Banten 2003-2006 .....	40
Tabel 6	Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Tamatan Periode 2001-2005 .....	41
Tabel 7	IMH Provinsi Banten Tahun 2002-2005 .....	44
Tabel 8	Banyaknya Tindak Kejahatan yang Terjadi Menurut Jenis Kejahatan di Banten 2005 .....	45
Tabel 9	Tingkat Partisipasi Masyarakat Provinsi Banten dalam Organisasi Politik 2002-2006 .....	47
Tabel 10	Jumlah Aspirasi Masyarakat (Unjuk Rasa) Provinsi Banten 2002-2006 .....	48
Tabel 11	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2001-2005 .....	53
Tabel 12	Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha di Kota Depok, Tahun 2005 ...	57
Tabel 13	Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama Di Kota Depok, Tahun 2005.....	58
Tabel 14	Alasan Utama Diperlukannya Pemekaran Kabupaten Tangerang.....	63
Tabel 15	Alasan Masyarakat Setuju Terhadap Pemekaran Kabupaten Tangerang .....	65

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gerakan reformasi 1998 yang menjatuhkan pemerintahan Orde Baru telah mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pada zaman Orde Baru pemerintahan diselenggarakan berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan dengan titik berat pada asas dekonsentrasi. Akan tetapi, sejak diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan titik berat pada desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah pusat menyerahkan sebagian besar urusan pemerintahan kepada daerah otonom. Pemerintah pusat hanya memegang 6 urusan pemerintahan: politik luar negeri, keuangan dan moneter nasional, pertahanan, keamanan, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan di luar 6 urusan tersebut pengaturan dan pengurusannya diserahkan kepada daerah: provinsi dan kabupaten/kota.

Sistem pemerintahan daerah model baru tersebut disamping memberikan kewenangan yang luas kepada daerah juga membuka peluang adanya pemekaran daerah, yaitu memekarkan satu daerah otonom yang sudah ada menjadi dua daerah dengan cara menjadikan bagian dari daerah otonom tersebut menjadi daerah otonom baru. Sampai tahun 2007 ini telah terbentuk 173 daerah otonom yang terdiri atas tujuh provinsi, 135 kabupaten, dan 31 kota (Suara Karya, 30 Oktober 2006).

Pemekaran daerah ditujukan untuk mengatasi masalah administrasi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam yang dihadapi oleh daerah otonom sebagai akibat dari perubahan lingkungan. Masalah administrasi terkait dengan *chachment area*, cakupan wilayah yang terlalu luas sehingga menyulitkan pemberian pelayanan kepada semua penduduk di semua bagian wilayah karena rentang kendalinya terlalu jauh. Di samping itu, ia juga menyulitkan sistem pengendaliannya. Masalah politik terkait dengan tuntutan partisipasi politik yang harus diakomodasi demi mempercepat pendemokrasian masyarakat lokal. Masalah ekonomi terkait dengan pemerataan hasil pembangunan, percepatan



peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan sumber daya lokal strategis dan potensial, dan pembangunan kekuatan ekonomi lokal. Masalah sosial budaya terkait dengan identitas daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari penguatan jati diri bangsa. Adapun masalah pertahanan dan keamanan terkait dengan tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan baik internal maupun eksternal. Dengan adanya pemekaran daerah, maka masalah-masalah tersebut dapat diatasi sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat tercapai.

Akan tetapi, dalam kenyataan tidak sedikit pemekaran daerah justru menimbulkan masalah baru. Banyak daerah otonom baru tidak mampu membiayai dirinya sendiri, berselisih batas wilayah, warga daerah induk berkonflik dengan warga daerah pemekaran karena tidak setuju disatukan dengan “komunitas lain”, dan rebutan sumber daya alam. Kondisi semacam ini tentu berdampak pada kinerja pemerintahan daerah otonom baru dan daerah otonom induk. Daerah otonom baru mengalami ketidakefektifan administrasi dan daerah otonom induk mengalami defisit anggaran belanja dan penurunan kinerja.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemekaran daerah menjauh dari tujuannya. Tujuan pemekaran daerah adalah sebagai alat untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dengan pemekaran daerah, diharapkan pelayanan publik dapat didekatkan dengan penerimanya, potensi daerah dapat diproduktifkan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat lebih cepat dilakukan karena tidak terkendala dengan luasnya wilayah dan panjangnya birokrasi. Akan tetapi, yang terjadi adalah kondisi sebaliknya. Daerah otonom baru hasil pemekaran administrasinya tidak efektif, APBD-nya tergantung dari daerah induk dan pemerintah pusat, PAD tidak meningkat, solidaritas masyarakat menurun, yang pada gilirannya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

## **B. Permasalahan**

Rasional pemekaran daerah adalah adanya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan tumbuhnya daerah suburban. Pertumbuhan penduduk yang mendiami di semua sudut wilayah negara dan tumbuhnya komunitas-komunitas baru memerlukan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat. Sedangkan

tumbuhnya wilayah suburban menuntut pelayanan perkotaan, seperti air bersih, infrastruktur, penerangan, jasa, kawasan industri dan perdagangan, dan transportasi. Dengan hanya mengandalkan daerah otonom yang sudah ada maka pelayanan-pelayanan publik seperti itu tidak dapat dipenuhi secara maksimal.

Pemekaran daerah memang mengakibatkan pemekaran administrasi pemerintahan daerah. Akan tetapi, bertambahnya administrasi pemerintahan daerah tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik daripada sebelum adanya pemekaran. Hal ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa dengan pembentukan satuan administrasi pemerintahan baru pada wilayah yang sangat luas dan/atau pada daerah suburban yang karakteristiknya tidak sama dengan daerah induk yang umumnya bersifat perdesaan, maka ia akan mampu memberikan layanan administrasi pemerintahan yang lebih efisien.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa pembentukan suatu daerah otonom baru, dimungkinkan dengan memekarkan daerah dan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Dengan demikian, jelas bahwa usul pembentukan suatu daerah tidak dapat diproses apabila hanya memenuhi sebagian syarat saja, seperti halnya sebagian besar dari usul-usul pembentukan daerah sebelumnya hanya didasarkan pada pertimbangan faktor politis atau faktor sejarah saja. Pembentukan daerah harus bermanfaat bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Di samping itu, pembentukan daerah juga mengandung arti bahwa daerah tersebut harus mampu melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Pembentukan suatu daerah otonom baru, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu lagi melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan demikian, baik daerah yang dibentuk maupun daerah yang dimekarkan atau daerah induk secara sendiri-sendiri dapat melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan kemampuannya.

Banyak kasus pemekaran wilayah yang telah dilakukan hasil akhirnya tidak sesuai dengan tujuan pemekaran suatu wilayah, dimana kinerja daerah menjadi lamban dan bahkan ada yang berakhir dengan konflik. Hal tersebut terkuak pada saat musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) awal tahun 2005 di Jakarta. Pada kesempatan itu Mendagri menegaskan, “sejak otonomi daerah (otda) digulirkan, pemekaran wilayah di seluruh Indonesia sudah mencapai kurang lebih 79 daerah. Setelah dilakukan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang baru itu, kebanyakan hasilnya tidak memuaskan atau kinerja lamban. Sambil menunggu hasil-hasil pengkajian Depdagri itu, diputuskan usulan mengenai pemekaran akan ditunda dulu sampai batas waktu yang belum diketahui”.

Sebagai contoh, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya yang setelah dibagi dua, menurut Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan justru mengalami penurunan pendapatan asli daerah (PAD); di mana PAD-nya juga dibagi dua dan ternyata jumlahnya jadi kecil (Pikiran Rakyat, Bandung, 19 Agustus 2004). Bagaimana mungkin kondisi tersebut dapat mendorong kesejahteraan bagi seluruh warga?

Dengan demikian, yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana melakukan pemekaran daerah yang hasil akhirnya dapat diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan model pemekaran daerah yang bagaimana yang dapat melahirkan daerah otonom baru yang menyejahterakan masyarakat tersebut? Namun, untuk menjawab permasalahan di atas, perlu dilakukan penelitian awal yang hasilnya dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun model pemekaran daerah yang dapat menyejahterakan masyarakat yang dimaksud. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian awal (tahun pertama) ini adalah:

1. apa alasan logis masyarakat daerah penelitian (yang sudah berhasil melakukan pemekaran dan yang sedang mengajukan pemekaran) menuntut daerahnya untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru, terpisah dari daerah induknya.
2. bagaimanakah proses politik dan yuridis yang dilakukan pemda daerah penelitian (yang sudah berhasil melakukan pemekaran dan yang sedang

mengajukan pemekaran) untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan pemekaran daerah.

3. bagaimana dampak (*outcome*) pemekaran daerah bagi daerah yang telah berhasil dimekarkan terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan penelitian tahap awal (tahun pertama) ini adalah:

1. mendeskripsikan alasan logis masyarakat daerah penelitian (yang sudah berhasil melakukan pemekaran dan yang sedang mengajukan pemekaran) menuntut daerahnya untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru, terpisah dari daerah induknya;
2. mendeskripsikan proses politik dan yuridis yang dilakukan Pemda lokasi penelitian (yang sudah berhasil melakukan pemekaran dan yang sedang mengajukan pemekaran) untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan pemekaran daerah; dan
3. mendeskripsikan dampak (*outcome*) pemekaran daerah bagi daerah yang telah berhasil dimekarkan terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Adapun manfaatnya adalah sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam penyusunan model pemekaran daerah yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, dan memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan agar ketika memekarkan daerah benar-benar mempertimbangkan semua aspek sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian ini.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah menjadi aksioma dalam sistem pemerintahan di Indonesia (Bhenyamin Hoessein, 2000). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal dua konsep: desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah kebijakan administrasi, yaitu penyerahan kewenangan pemerintahan bidang politik maupun administrasi kepada daerah (Hanif Nurcholis, 2005). Adapun otonomi daerah adalah kebijakan politik yang memberikan ruang dan hak kepada masyarakat lokal untuk mengatur dan mengurus urusannya berdasarkan aspirasi dan kepentingannya (Bhenyamin Hoessein, 1993).

Koswara (2001) menjelaskan bahwa kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 telah menggeser kebijakan administrasi pemerintahan daerah dari desentralisasi yang bersifat dekonsentratif ke desentralisasi yang bersifat devolutif. Akibat dari pergeseran konsepsi ini adalah gerak ke arah demokratisasi yang berkeadilan dari sistem pemerintahan yang lebih menekankan efisiensi pelayanan (Bhenjamin Hoessein, 1995). Sistem desentralisasi yang lebih bersifat devolutif tersebut ditandai dengan dua hal: 1) dianutnya sistem prefektoral terintegrasi pada provinsi dan otonomi murni pada kabupaten/kota, 2) penyerahan kewenangan pemerintahan dengan cara *general competence* atau *open end arrangement* kepada daerah yang membawa konsekuensi pada luasnya kewenangan daerah karena merupakan residu dari kewenangan pusat yang hanya terdiri atas enam kewenangan: politik luar negeri, hankam, moneter, peradilan, agama, dan kewenangan lain (Hanif Nurcholis, 2005).

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta/partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Batinggi, Achmad (1999) menjelaskan bahwa semakin lama tuntutan masyarakat semakin banyak akan bidang-bidang yang memerlukan pelayanan umum dari pemerintah. Hal ini disebabkan antara lain: 1) pendidikan masyarakat semakin meningkat, sehingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan umum juga terus meningkat; 2) masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi tentang perkembangan daerah lain, sehingga masyarakat menuntut adanya perbaikan pelayanan umum dari pemerintah; dan 3) partisipasi masyarakat dalam pembangunan makin meningkat, sehingga semakin banyak anggota masyarakat yang merasa perlunya perbaikan pelayanan umum pemerintah.

Pada hakikatnya, pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi utama: 1) memberikan pelayanan/*services* baik perorangan maupun publik/khalayak, 2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*development for economic growth*), dan 3) memberikan perlindungan/*protective* kepada masyarakat (Hanif Nurcholis, 2005).

Adapun yang dapat dijadikan indikator kualitas pelayanan meliputi 5 (lima) dimensi yaitu: a) *tangibles*; kualitas pelayanan berupa sarana fisik kantor, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dan sebagainya; b) *reability*; kemampuan dan keandalan dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya; c) *responsivness*; kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen; d) *assurance*; kemampuan dan keramahan dan sopan santun dalam meyakinkan kepercayaan konsumen; e) *emphaty*; sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan layanan kepada konsumen (Amy Y.S. Rahayu, 1997).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh dengan cara membentuk daerah otonom baru atau pemekaran wilayah (menumbuh kembangkan wilayah). Menurut Parr (1999), pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah merupakan suatu proses kontinyu sebagai hasil dari berbagai pengambilan keputusan di dalam ataupun yang mempengaruhi suatu wilayah. Proses yang terjadi sangat kompleks, melibatkan aspek ekonomi, aspek sosial, lingkungan dan politik (pemerintah) sehingga pada hakikatnya merupakan suatu "sistem" pembangunan wilayah yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Lebih lanjut

Parr (1999), mengemukakan bahwa wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor yang diadopsi dari Fisher dan Clark yang mengemukakan bahwa berkembangnya wilayah dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni primer (pertanian, kehutanan, perikanan), sekunder (pertambangan, manufaktur, konstruksi, utilitas publik) dan tersier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa). Perkembangan ditandai oleh penggunaan sumber daya dan manfaatnya – yang menurun di sektor primer, meningkat di sektor tersier, dan meningkat hingga pada suatu tingkat tertentu di sektor sekunder.

Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri (2004), mengemukakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan wilayah dalam masa sekarang tidak dapat dilepaskan dengan semakin luas dan terspesialisasinya sektor-sektor jasa. Sektor ekonomi beroperasi efisien untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga memberi ruang bagi terciptanya permintaan, aspirasi dan kepuasan. Lebih lanjut Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri (2004) mengemukakan ada beberapa penentu penting yang mencirikan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. *Pertama*, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat maju sehingga mampu menciptakan produk dan proses produksi baru dalam banyak sektor. Fenomena ini mengakibatkan wilayah berkembang semakin kompleks dan dinamis mengikuti bergantinya teknologi untuk memenuhi kepuasan setiap individu. *Kedua*, teknologi informasi dan mekanisme pasar secara gradual telah diterima sebagian besar orang sehingga memungkinkan aliran informasi, keuntungan ekonomi dan modal ke berbagai wilayah. *Ketiga*, perkembangan dan diterimanya kerangka pemikiran (kalangan) akademis juga mempengaruhi perkembangan wilayah. *Keempat*, faktor-faktor budaya dan permintaan sosial akan aspek kenyamanan dan kepuasan lainnya di masa mendatang akan makin menonjol seiring dengan kenaikan kesejahteraan.

Oleh karena itu, pemekaran wilayah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui: a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat; b. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; c. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; d. percepatan pengelolaan potensi daerah; e. peningkatan keamanan dan ketertiban; dan f.

peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah, di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal (Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000).

Menurut Sadu Wasistiono (dalam Pikiran Rakyat, 19/8/2004), rencana pemekaran wilayah yang terus berembus dalam era otonomi daerah ini, harus benar-benar diarahkan demi semakin mendekatkan fungsi pelayanan birokrasi pemerintahan daerah terhadap rakyatnya. Seharusnya ukuran pemekaran tersebut adalah mempersempit kendali pelayanan, sehingga akan tercipta kualitas pelayanan yang semakin baik. Tanpa hal itu, persepsi yang mengaitkan wacana pemekaran wilayah sekadar euforia otonomi yang semata terkait dengan logika kekuasaan, akan semakin menguat. Di mana kalau bicara jujur, tambah Sadu Wasistiono, saat ini banyak wacana pemekaran lebih diarahkan untuk memenuhi keinginan dan ambisi birokrat dan politisi.

Di sisi lain, para pakar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran (Pikiran Rakyat, 20/7/2004) mengatakan UU Nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah yang sebenarnya mengandung perbaikan bagi paradigma birokrasi pemerintahan menjadi lebih demokratis, lebih dilihat dari aspek kekuasaan dan keuntungan material semata. Selain itu, lemahnya pemaknaan esensial UU tersebut oleh aparat pemerintah dan para elite politik di daerah, menyebabkan tujuan hakiki meningkatkan kesejahteraan rakyat akhirnya semakin jauh dari kenyataan, karena aparat pemerintah daerah dan elite politik lainnya hanya berpikir logika kekuasaan belaka.

Dari kajian-kajian di atas, dapat ditarik suatu “benang merah” bahwa setiap usulan mengenai pemekaran wilayah atau pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru di suatu wilayah seharusnya benar-benar merupakan kebutuhan objektif masyarakat yang didukung oleh potensi ekonomi, SDM, sarana dan prasarana, dan *capital social* yang memadai bukan semata kehendak para elite. Jangan terjadi setiap upaya pemekaran wilayah, justru memunculkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang akhirnya dibagi dua.

Dengan demikian, pemekaran wilayah atau pembentukan pemerintahan daerah baru harus berdasarkan pertimbangan administratif, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pertimbangan administratif mengacu pada efisiensi pelayanan



publik. Pertimbangan politik mengacu pada partisipasi dan tanggung jawab masyarakat lokal untuk ikut serta dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang bersifat lokal dalam lembaga pemerintahan lokal setempat. Pertimbangan ekonomi mengacu pada sejauh mana daerah yang akan dibentuk tersebut mampu membiayai diri dan mengembangkan potensi ekonominya untuk menyejahterakan rakyatnya. Pertimbangan sosial budaya mengacu pada tingkat kohesivitas masyarakat daerah yang bersangkutan dalam membentuk komunitas sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Jika dinilai pelayanan publik pada suatu wilayah negara tidak efisien, maka bisa dipertimbangkan pembentukan pemerintahan daerah termasuk pemekaran pemerintahan daerah yang sudah ada. Untuk sampai pada keputusan membentuk pemerintahan daerah baru, harus dilihat aspek politik, ekonomi, dan sosial budayanya. Aspek politik melihat apakah masyarakat yang tinggal di daerah yang akan dibentuk satuan pemerintahan lokal tersebut mendukung sepenuhnya. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri karena masyarakatlah yang menjadi subyek/pelaku utamanya. Aspek ekonomi melihat apakah sumber daya ekonomi daerah yang bersangkutan potensial untuk membiayai diri dan dapat ditumbuhkan menjadi kekuatan yang bisa menciptakan kesejahteraan rakyat setempat. Aspek sosial budaya melihat apakah masyarakat yang tinggal di daerah yang akan dibentuk satuan pemerintahan daerah tersebut akan menjadi satu komunitas yang solid sebagai satu kesatuan masyarakat hukum.

Untuk mengetahui apakah pelayanan publik pada pemerintah daerah yang sudah ada tidak efisien bisa dilakukan pengkajian atas kinerja pelayanan, *span of control*, dan *outcomenya*. Adapun apakah kesatuan masyarakat hukum pada daerah yang bersangkutan berkeinginan kuat untuk memecah diri menjadi dua entitas, harus dilakukan penelitian secara mendalam karena konsep kesatuan masyarakat hukum itu sendiri adalah sebuah konsep sosial politik dan budaya yang menyangkut aspek filosofis, politik, geopolitik, psikologis, dan sosial-budaya. Untuk itu, pemecahan diri menjadi dua entitas tersebut harus dikaji secara komprehensif menyangkut semua aspek tersebut.

Untuk mengetahui apakah kesatuan masyarakat hukum pada suatu daerah mempunyai keinginan untuk memecah diri menjadi dua entitas atau lebih bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu politik dan administratif. Pendekatan politik bisa dilakukan dengan cara referendum daerah yang kemudian dilegalisasi. Pendekatan administratif dilakukan dengan pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah dan DPR tanpa melibatkan langsung anggota kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan.

Pendekatan politik lebih absah, *legitimate* karena mendapat dukungan langsung dari masyarakat sepenuhnya sedangkan pendekatan administratif kurang absah karena lebih mencerminkan keinginan para elitnya daripada anggota masyarakat sendiri. Karena itu, seringkali pendekatan administratif mendapat tantangan dari anggota masyarakat. Cara lain adalah gabungan antara pendekatan politik dan administratif. Dalam pendekatan gabungan ini pemerintah melakukan kajian yang mendalam atas keinginan rakyat disertai dengan data kuantitatif yang bersifat administratif lalu dilegalisasi.

Dengan demikian, bila pemerintah pusat ingin membuat kebijakan membentuk pemerintah daerah baru maka perlu dilakukan pengkajian administratif, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pengkajian administratif mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan:

1. Apakah pemerintah daerah yang ada saat ini sudah tidak mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat? Mengapa tidak mampu?
  - a. Terlalu luas daerahnya yang menyebabkan terlalu luas *span of control*nya sehingga menyulitkan perintah, pengawasan, koordinasi, dan laporan?
  - b. Terlalu sedikit SDMnya?
  - c. SDM yang tidak kompeten?
  - d. Anggaran kurang?
  - e. Atau apa?
2. Apakah pelayanan masyarakat di Pemda yang sudah ada dapat dijamin lebih baik jika dimekarkan?
  - a. Seberapa besar kenaikan alokasi dana untuk *public service*?

- b. Seberapa besar kenaikan alokasi dana untuk *development for economic growth*?
  - c. Seberapa besar kenaikan indeks tingkat keamanan dan ketenteraman masyarakat?
  - d. Seberapa mampu Pemda menaikkan PDRB demi peningkatan kesejahteraan masyarakat?
3. Apakah masyarakat akan mendapat pelayanan lebih baik oleh pemerintah daerah baru?
    - a. Berapa alokasi dana yang diterima masyarakat sebagai *output public service*?
    - b. Seberapa jauh kemampuan aparat *public servant* dalam memberikan pelayanan publik, merencanakan pembangunan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, dan memberikan perlindungan masyarakat?
    - c. Seberapa mampu pemerintah daerah baru menaikkan PDRB demi peningkatan kesejahteraan masyarakat?
  4. Apakah sumber daya mendukung pembentukan daerah otonom baru?
    - a. Bagaimana SDM-nya?
    - b. Bagaimana sumber daya ekonominya?
    - c. Bagaimana infrastrukturnya?
    - d. Bagaimana kelembagaannya?

Pengkajian politik menjawab atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah rakyat benar-benar menginginkan membentuk daerah otonom baru?
2. Apakah rakyat bisa membentuk satu entitas baru sebagai kesatuan masyarakat hukum atas dasar kesamaan kepentingan, budaya, adat, dan cita-cita?
3. Apakah rakyat mempunyai kemampuan menyelenggarakan pemerintahan daerah secara tertib, aman, dan bertanggung jawab?

Pengkajian ekonomi menjawab atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah PAD mencukupi?
2. Seberapa prospektif pertumbuhan ekonomi ke depan?
3. Berapa persen perbandingan PAD dan PDRB?
4. Berapa *income* per kapita?
5. Berapa sumber daya ekonomi potensial?

Pengkajian sosial budaya menjawab atas pertanyaan-pertanyaan:

1. Apakah masyarakat di daerah baru tersebut memiliki kesamaan budaya, suku, ras, dan golongan?
2. Apakah masyarakat tidak memperlakukan perbedaan agama, ras, suku, dan golongan dalam sistem pemerintahan daerah yang akan dibentuk?
3. Apakah masyarakat memiliki lembaga yang mapan sehingga dapat menunjang keberadaannya sebagai kesatuan masyarakat hukum baru?

Jadi, dalam pembentukan pemerintahan daerah baru pertanyaannya bukan pada apakah daerah otonom yang sudah ada dapat dimekarkan dengan melihat aspek-aspek berikut: potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, aparatur, infrastruktur, keamanan, pelayanan, cakupan wilayah, dan calon ibukota. Akan tetapi, pertanyaan yang benar adalah apakah daerah otonom yang sudah ada telah tumbuh suatu komunitas baru yang berpotensi menjadi kesatuan masyarakat hukum baru dan mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan jika ia disertai untuk mengatur dan mengurusnya.

Dari sisi legal *framework*, yaitu berdasarkan UU No. 32/2004 maka pemekaran daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD Provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat administratif untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pemekaran wilayah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Kemampuan ekonomi merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang dapat diukur dari : a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan b. penerimaan daerah sendiri. Potensi daerah merupakan cerminan tersedianya sumberdaya yang dapat dimanfaatkan

dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari:

- a. lembaga keuangan;
- b. sarana ekonomi;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana transportasi dan komunikasi,
- f. sarana pariwisata; dan
- g. ketenagakerjaan.

Sosial budaya merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat diukur dari:

- a. tempat peribadatan;
- b. tempat/kegiatan institusi sosial dan budaya; serta
- c. sarana olah raga.

Sosial politik merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari:

- a. partisipasi masyarakat dalam berpolitik; dan
- b. organisasi kemasyarakatan.

Jumlah penduduk merupakan jumlah tertentu penduduk suatu daerah. Luas daerah merupakan luas tertentu suatu daerah. Pertimbangan lain merupakan pertimbangan untuk terselenggaranya otonomi daerah yang dapat diukur dari:

- a. keamanan dan ketertiban,
- b. ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan,
- c. rentang kendali,
- d. Provinsi yang akan dibentuk minimal telah terdiri atas 3 (tiga) Kabupaten dan atau Kota,
- e. Kabupaten yang akan dibentuk minimal telah terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan, dan
- f. Kota yang akan dibentuk minimal telah terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan.

Syarat fisik meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan

kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Cara pengukuran dan penilaian persyaratan pembentukan daerah/pemekaran wilayah dilakukan berdasarkan ketentuan PP 129/2000 (lihat lampiran). Selanjutnya prosedur pembentukan daerah/pemekaran wilayah adalah sebagai berikut.

- a. Ada kemauan politik dari Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kemauan politik dari Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah adanya pernyataan-pernyataan masyarakat melalui LSM-LSM, organisasi-organisasi politik dan lain-lain, pernyataan Gubernur, Bupati/Walikota yang bersangkutan, yang selanjutnya dituangkan secara resmi dalam bentuk persetujuan tertulis baik melalui Kepala Daerah dan DPRD yang bersangkutan.
- b. Pembentukan daerah harus didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan penelitian awal, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak manapun yang dapat mendukung pembentukan daerah dimaksud.
- c. Usul pembentukan Provinsi disampaikan kepada Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan melampirkan hasil penelitian Daerah dan persetujuan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi dimaksud, yang dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- d. Usul pembentukan kabupaten/kota disampaikan kepada Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan melampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota serta persetujuan DPRD Provinsi, yang dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- e. Dengan memperhatikan usulan Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke daerah yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- f. Berdasarkan rekomendasi pada huruf e., Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah meminta tanggapan para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi

- Daerah dan dapat menugaskan Tim Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ke daerah untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
- g. Para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah memberikan saran dan pendapat secara tertulis kepada Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
  - h. Berdasarkan saran dan pendapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, usul pembentukan suatu daerah diputuskan dalam rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
  - i. Apabila berdasarkan hasil keputusan rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui usul pembentukan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengajukan usul pembentukan daerah tersebut beserta Rancangan Undang-undang Pembentukan Daerah kepada Presiden.
  - j. Apabila Presiden menyetujui usul dimaksud, Rancangan Undang-undang Pembentukan Daerah disampaikan kepada DPR-RI untuk mendapatkan persetujuan (PP 129/2000).

Sebagai suatu kasus pemekaran adalah apa yang dilakukan Tim Mediasi Pemekaran Banyumas (2004). Tim menarik kesimpulan bahwa wilayah Banyumas lulus untuk dimekarkan menjadi dua daerah otonom, yakni Kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas. Kesimpulan tersebut diperkuat dengan data-data yang digali dan diolah para pakar yang tergabung dalam tim peneliti, dua daerah tersebut dinyatakan lulus uji sesuai yang diamanatkan PP No 129 Tahun 2000 tentang Pemekaran Wilayah sehingga tidak ada alasan lagi untuk menghentikan proses kajian pemekaran ataupun tuntutan yang berkembang di masyarakat ([www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), Senin, 1 Maret 2004).

Di tempat lain, Pemda Serang bekerja sama dengan Pusat Kajian Pemerintahan STPDN (2005), dalam hasil penelitiannya tentang Studi Kelayakan Pembentukan Kota Otonom Serang menyimpulkan mendukung pemekaran. Di mana berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian terhadap kemampuan daerah melalui studi kelayakan, ternyata Kabupaten Serang dinyatakan lulus bersyarat menurut kriteria satu dan lulus untuk dimekarkan menurut kriteria dua. Kriteria tersebut menggunakan skor terhadap kemampuan daerah Kabupaten Serang untuk dimekarkan berdasarkan variabel kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial

budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya. Dengan kriteria pertama yang didasarkan pada PP nomor 129/2000, nilai skor pemekaran 2.950 atau dinyatakan lulus bersyarat, namun dengan kriteria kedua yang dikembangkan Depdagri dan Otda, Biro Pusat Statistik, Bappenas, dan Departemen Keuangan, pemekaran memiliki total skor 2.235 atau dinyatakan lulus. Berdasarkan hasil tersebut, keputusan pemekaran wilayah Kabupaten Serang menjadi Kota Serang dan Kabupaten Serang masih dalam proses pengusulan.

Berdasarkan uraian tersebut, dikembangkan kerangka pikir tentang model pemekaran daerah sebagai berikut: “Pemekaran daerah dapat dilakukan jika terpenuhi syarat administratif, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.”

Syarat administratif adalah ketidakmampuan administrasi pemerintah daerah induk memberikan pelayanan publik yang efisien kepada publik dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. *Span of control* terlalu luas dan panjang;
- b. Birokrasi terlalu panjang
- c. Pengurusan layanan publik tidak tepat waktu;
- d. Biaya pengurusan layanan publik mahal;
- e. Jarak pusat pelayanan dengan masyarakat yang dilayani terlalu jauh;

Syarat politik adalah adanya aspirasi masyarakat yang menginginkan dibentuknya kesatuan masyarakat hukum baru sebagai daerah otonom yang terpisah dari daerah otonom yang sudah ada untuk bisa mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Masyarakat melalui partai politik dan ormas mengusulkan pembentukan daerah otonom baru kepada DPRD;
- b. DPRD menyetujui usulan pemekaran tersebut;
- c. Kepala Daerah menyetujui usulan tersebut;
- d. Menteri Dalam Negeri menyetujui usulan tersebut;
- e. DPR menyetujui usulan tersebut;

Syarat ekonomi adalah keadaan ekonomi dengan indikator-indikator sebagai berikut.



- a. Kelayakan PAD jika dibagikan kepada calon daerah otonom.
- b. PDRB yang mencukupi untuk prediksi penyelenggaraan otonomi daerah.
- c. Kelayakan pendapatan per kapita komunitas pengusul pemekaran daerah.
- d. Sumber daya ekonomi potensial dan aktual yang memadai.

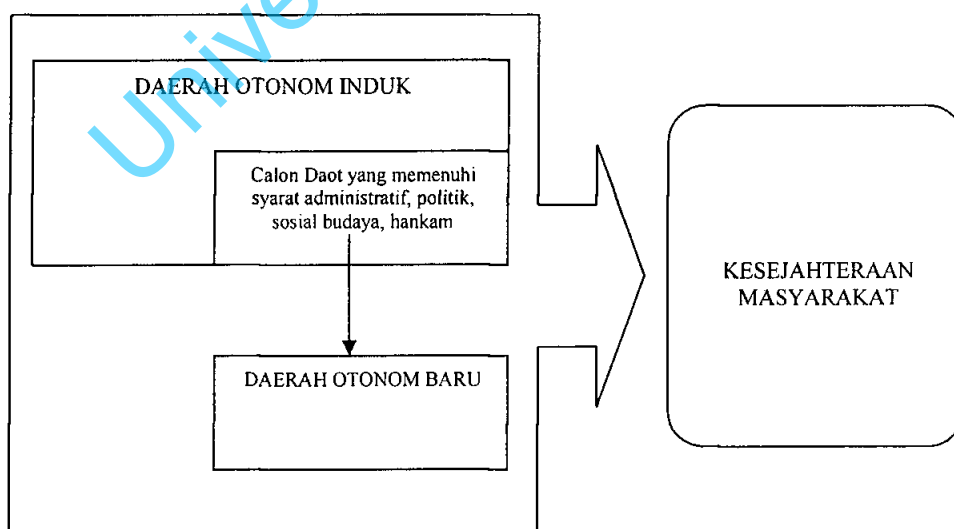
Syarat sosial budaya adalah keadaan sosial budaya masyarakat yang akan menjadi daerah otonom baru dengan indikator-indikator sebagai berikut.

- a. Adanya persamaan budaya.
- b. Adanya persamaan suku, ras, dan golongan.
- c. Adanya toleransi atas perbedaan agama, ras, suku, dan golongan.
- d. Adanya lembaga sosial yang mengatur sistem sosial calon daerah otonom secara serasi dan harmonis.

Syarat pertahanan dan keamanan adalah keadaan pertahanan dan keamanan di calon daerah otonom dengan indikator-indikator sebagai berikut.

- a. Angka kriminalitas yang rendah.
- b. Angka gangguan keamanan yang rendah.
- c. Angka tawuran horisontal yang rendah.
- d. Tidak ada ancaman disintegrasi.
- e. Tidak ada ancaman dari luar negeri.

Atas dasar konsepsi tersebut dikembangkan pemikiran dalam bentuk bagan sebagai berikut.



Bagan di atas, menjelaskan bahwa daerah otonom induk dapat mengusulkan pemekaran daerah asal calon daerah otonom baru secara obyektif memenuhi syarat administrasi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Jika demikian kondisinya maka pemekaran daerah dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Universitas Terbuka

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik/kualitatif. Tahap pertama, penelitian ini bertujuan: a) mendeskripsikan alasan logis masyarakat yang menuntut daerahnya untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru. Di sini akan dipilah menjadi dua: masyarakat yang sudah berhasil mendapatkan daerah otonom baru dan masyarakat yang masih berjuang mendapatkan daerah otonom; b) mendeskripsikan proses politik dan yuridis yang dilakukan Pemda daerah penelitian (yang sudah berhasil melakukan pemekaran dan yang sedang mengajukan pemekaran) untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan pemekaran daerah, terpisah dari daerah induknya; c) mendeskripsikan dampak (*outcome*) pemekaran daerah bagi daerah yang telah berhasil dimekarkan terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam penelitian deskriptif tersebut data diambil melalui studi dokumen, wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan kunci, dan studi pustaka. Data yang terkumpul dikategorisasi, dipetakan (*mapping*), kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah gambaran konkrit alasan masyarakat yang menuntut daerahnya dimekarkan dan analisis kritis atas alasan tersebut dikaitkan dengan kerangka teoritis daerah otonom dan *legal framework* yang ada.

Pada tahun kedua, berdasarkan hasil penelitian pada tahap pertama dikembangkan model pemekaran wilayah. Model ini mengacu pada paradigma, konsepsi, konstruksi, dan *framework* otonomi daerah berdasarkan UU No. 32/2004. Hasilnya adalah draf model pemekaran wilayah/daerah otonom yang sesuai dengan paradigma, konsepsi, konstruksi, dan *framework* otonomi daerah berdasarkan UU No. 32/2004 tersebut. Metode yang dipakai dalam pengembangan model ini adalah pengembangan draf akademis berdasarkan kajian teoritis yang mendalam ditambah dengan *focus group discussion* dan lokakarya yang melibatkan para pejabat yang terlibat langsung dalam penyusunan rencana pemekaran wilayah, tokoh-tokoh LSM, pengurus partai politik, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Draf model yang dikembangkan tersebut lalu diseminarkan yang diikuti oleh para pejabat yang terlibat langsung dalam penyusunan rencana pemekaran wilayah ditambah dengan tokoh LSM, pengurus partai politik, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Setelah draf model disempurnakan berdasarkan seminar tersebut, lalu divalidasi melalui *focus group discussion* dengan para pakar dan praktikus.

Tahap ketiga adalah melakukan validasi model dengan cara mempraktikkan langsung draf model yang dikembangkan tersebut di daerah yang sedang merencanakan pemekaran wilayah/daerah otonom. Pada tahap ini semua kelemahan baik konsepsi maupun implementasi secara terus menerus divalidasi bersamaan dengan praktik penyusunan rencana di semua tingkatan tersebut.

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah deskripsi daerah penelitian khususnya menyangkut alasan pemekaran, proses pemekaran (baik bagi daerah penelitian yang telah menjadi daerah otonom, yaitu Provinsi Banten dan Kota Depok maupun calon daerah otonom baru, yaitu Kota Tangerang Selatan) dan dampak/hasil pemekaran bagi daerah penelitian Provinsi Banten dan Kota Depok yang dilihat dari kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Deskripsi ekonomi adalah penjelasan tentang perkembangan PDRB, pertumbuhan ekonomi, selama menjadi daerah otonom baru. Deskripsi sosial adalah penjelasan tentang perkembangan bidang pendidikan, angkatan kerja dan kesehatan. Deskripsi budaya adalah penjelasan tentang lembaga budaya, ekspresi budaya, dan aktualisasi budaya. Deskripsi kondisi politik adalah penjelasan perkembangan lembaga politik, dan aspirasi masyarakat. Deskripsi pertahanan dan keamanan adalah penjelasan tentang keadaan keamanan dan tingkat keamanan.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN

#### 1. Kondisi Umum Provinsi Banten

##### a. Geografis

Wilayah Provinsi Banten mempunyai luas 8.800,83 km<sup>2</sup>. Secara administratif terdiri atas empat kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, dan dua kota, yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Jumlah kecamatan di seluruh Banten sebanyak 135. Sedangkan jumlah desa/kelurahan adalah 1.483.

Wilayah Provinsi Banten berada pada batas astronomis 105<sup>o</sup>1'11"–106<sup>o</sup>7'12" BT dan 5<sup>o</sup>7'50"–7<sup>o</sup>1'1" LS, mempunyai posisi strategis pada lintas perdagangan internasional dan nasional dengan batas-batas sebagai berikut.

- 1) Sebelah utara dengan Laut Jawa.
- 2) Sebelah timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.
- 3) Sebelah selatan dengan Samudra Hindia.
- 4) Sebelah barat dengan Selat Sunda.

##### b. Demografis

Jumlah penduduk Banten terus bertambah dari tahun ke tahun, misalnya pada tahun 2000, jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 (SP2000) sebanyak 8.096.809 jiwa dan tahun 2005 meningkat menjadi 9.308.944 jiwa yang terdiri atas laki-laki 4.701.284 jiwa lebih banyak dibanding perempuan yang jumlahnya 4.607.660 jiwa. Sementara itu, jumlah rumah tangga tercatat sebanyak 2.504.330. Diperkirakan jumlah penduduk Banten pada tahun 2006 sekitar 9.424,3 ribu jiwa (lihat tabel 1).

Tabel 1  
 Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Banten Tahun 2006 –2009  
 (Ribu)

Kabupaten	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kabupaten</b>				
1. Pandeglang	1.124,6	1.132,1	1.140,7	1.242,4
2. Lebak	1.162,2	1.171,9	1.181,9	1.286,5
3. Tangerang	3.372,6	3.390,8	3.402,6	3.690,8
4. Serang	1.882,7	1.895,7	1.911,1	2.079,6
<b>Kota</b>				
5. Tangerang	1.543,1	1.552,2	1.560,7	1.696,7
6. Cilegon	339,1	343,9	348,7	381,7
<b>Banten</b>	<b>9.424,3</b>	<b>9.486,6</b>	<b>9.545,7</b>	<b>10.377,7</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2005

Berdasarkan data tersebut, terdapat kecenderungan penduduk yang terus bertambah dari periode sensus yang satu ke sensus atau survei berikutnya menjadi masalah tersendiri. Pertumbuhan penduduk di Provinsi ini bukan saja disebabkan oleh penambahan penduduk secara alamiah, tetapi tidak terlepas dari kecenderungan migrasi yang disebabkan daya tarik provinsi Banten, baik dilihat dari potensi daerah seperti banyaknya perusahaan industri besar/sedang di daerah Cilegon, Tangerang dan Serang serta potensi pariwisata di Pandeglang, Serang dan daerah lainnya, sehingga ketersediaan lapangan kerja dan makin kondusifnya kesempatan berusaha akan menarik pendatang dari luar Banten.

Laju Pertumbuhan penduduk Banten selama kurun waktu 2000-2005 rata-rata tumbuh sebesar 2,83 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan pertumbuhan antara tahun 1990-2000 yang rata-rata tumbuh sebesar 3,21 persen. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan.

## 2. Kondisi Umum Kota Depok

### a. Geografi

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6° 19'00'' - 6° 28' 00'' Lintang Selatan dan 106° 43' 00''-106° 55' 30'' Bujur Timur. Bentang alam

Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah, perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50–140 meter di atas permukaan laut, dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota Depok sebagai salah satu wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km<sup>2</sup> atau 0,58% dari luas Provinsi Jawa Barat.

Wilayah Kota Depok berbatasan dengan tiga Kabupaten/kota dan dua Provinsi. Secara lengkap wilayah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang dan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Letak Kota Depok sangat strategis, diapit oleh Kota Jakarta dan Kota Bogor. Hal ini menyebabkan Kota Depok semakin tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang tersinkronisasi secara regional dengan kota-kota lainnya.

#### **b. Kondisi Demografi**

Berdasarkan data BPS Kota Depok, pada tahun 2006 penduduk Kota Depok berjumlah 1.420.480 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 719.969 jiwa dan penduduk perempuan 700.511 jiwa, meningkat signifikan dibanding jumlah penduduk pada tahun 2005 yang berjumlah 1.374.522 jiwa (BPS Kota Depok, 2006). Laju pertumbuhan penduduk Kota Depok sebesar 3,44 persen, sedangkan rasio jenis kelamin (RJK) di Kota Depok adalah 102 : 100 yang menunjukkan terdapatnya 102 laki-laki pada setiap 100 orang perempuan. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kota Depok lebih banyak dibandingkan perempuan. Kondisi ini berbeda dengan penduduk Indonesia secara umum yang lebih didominasi oleh penduduk perempuan.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan struktur usia di Kota Depok pada tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2  
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia di Kota Depok Tahun 2006

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+perempuan		RJK
	N	%	N	%	N	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
0-4	45.727	6,35	43.570	6,22	89.297	6,29	104,95
5-9	62.858	8,73	59.264	8,46	122.122	8,60	106,06
10-14	79.144	10,99	74.546	10,64	153.690	10,82	106,17
15-19	62.363	8,66	61.290	8,75	123.653	8,71	101,75
20-24	61.354	8,52	69.828	9,97	131.182	9,24	87,86
25-29	74.241	10,31	85.754	12,24	159.995	11,26	86,57
30-34	80.665	11,20	81.803	11,68	162.468	11,44	98,61
35-39	71.955	9,99	64.388	9,19	136.343	9,60	111,75
40-44	56.332	7,82	49.180	7,02	105.512	7,43	114,54
45-49	42.113	5,85	36.712	5,24	78.825	5,55	114,71
50-54	29.816	4,14	25.718	3,67	55.534	3,91	115,93
55-59	20.287	2,82	17.546	2,50	37.833	2,66	115,62
60-64	14.351	1,99	12.075	1,72	26.426	1,86	118,85
65-69	9.723	1,35	8.434	1,20	18.157	1,28	115,28
70-74	5.254	0,73	5.718	0,82	10.972	0,77	91,89
75+	3.786	0,53	4.685	0,67	8.471	0,60	80,81
Jumlah	719.969	100	700.511	100	1.420.480	100	102,78

Sumber: Kota Depok dalam angka 2006

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur yang paling dominan adalah kelompok usia 30 sampai 34 tahun sejumlah 162.478 jiwa atau sebesar 11,44%, diikuti oleh kelompok usia 25 sampai 29 tahun sejumlah 159.995 jiwa (11,26%).

Selanjutnya terdapat 365.109 jiwa atau 25,70 persen penduduk yang termasuk kelompok usia belum produktif secara ekonomi (0-14 tahun). Pada kelompok usia 0-14 tahun ini, laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan sehingga rasio jenis kelaminnya menunjukkan lebih dari seratus, tepatnya 105,83. Untuk kelompok usia produktif (15-64 tahun) terdapat 1.071.771 orang atau 71,65 persen dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,82, sedangkan penduduk yang dianggap sudah tidak produktif lagi yaitu berumur 65 tahun ke atas, yaitu sebanyak 37.600 orang atau 2,65 persen. Berbeda dengan kelompok umur 0-14 tahun dan 15-64 tahun, pada kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, sehingga rasio jenis kelamin untuk penduduk kelompok umur ini menunjukkan angka kurang dari seratus yakni 99,61. Lebih besarnya jumlah atau persentase penduduk perempuan dari laki-laki



pada kelompok 65 tahun ke atas ini menunjukkan angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

Hingga akhir tahun 2010 diproyeksikan jumlah penduduk Kota Depok mencapai 1.732.642 jiwa, dengan penduduk terbanyak diperkirakan ada di Kecamatan Cimanggis. Sedangkan hingga tahun 2015 diperkirakan jumlah penduduk Kota Depok mencapai 2.035.293 jiwa (lihat tabel 3)

Tabel 3  
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2010-2015 (Jiwa)

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
	2010	2015
Pancoran Mas	310,717	350,660
Sukmajaya	398,265	478,226
Beji	179,189	220,854
Sawangan	207,523	249,189
Limo	182,989	217,526
Cimanggis	451,925	515,111
Total	1,732,642	2,035,293

Sumber : Lakip Kota Depok Tahun 2006

Ditinjau dari tingkat kepadatannya, Kecamatan Beji dan Sukmajaya diperkirakan akan menjadi kecamatan terpadat di Kota Depok. Kondisi saat ini, kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, adalah Kecamatan Beji (10.041 jiwa/km<sup>2</sup>), kemudian Kecamatan Sukmajaya (9.204 jiwa/km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Pancoran Mas (8.541 jiwa/km<sup>2</sup>). Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah, adalah Kecamatan Sawangan, dengan tingkat kepadatan mencapai 3.639 jiwa/km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk Kota yang terus bertambah berbanding lurus dengan kompleksitas masalah kependudukan yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Kota. Salah satu aspek penting dari masalah kependudukan adalah masalah pendidikan, mengingat pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Banyaknya penduduk yang mendapatkan pendidikan di sekolah merupakan salah satu indikator tersedianya tenaga terdidik yang diprediksi dapat bersaing memasuki pasar kerja atau menciptakan lapangan kerja baru.

Berdasarkan data pada tahun 2005, penduduk Kota Depok 10 tahun ke atas yang tidak punya ijazah adalah sebanyak 117.483 orang atau 10,14 persen, tamat

SD/MI/Sederajat sebanyak 259.644 orang atau 22,41 persen, tamat SLTP/MTS/Sederajat sebanyak 203.452 orang atau 17,56 persen, tamat SMU/MA/Sederajat 285.134 orang atau 24,61 persen, tamat SMK sebanyak 112.037 orang atau 9,67 persen dan tamat Diploma I sampai dengan Universitas sebanyak 180.859 orang atau 15,61%.

### 3. Kondisi Umum Kabupaten Tangerang

Deskripsi umum Kabupaten Tangerang diberikan lebih rinci dan mencakupi aspek kehidupan yang lebih luas. Hal itu dilakukan agar lebih memberikan gambaran kondisi Kabupaten Tangerang yang merencanakan akan melakukan pemekaran wilayahnya, sehingga terbentuk daerah otonom baru, yaitu Kota Tangerang Selatan. Deskripsi kondisi daerah ini lebih lanjut akan menjadi bahan kajian kelayakan bagi rencana pemekaran wilayah.

#### a. Geografis

Kabupaten Tangerang, dengan luas wilayah 1.110,38 Km<sup>2</sup> secara administratif terdiri atas 26 kecamatan, 77 Kelurahan dan 251 desa dan secara geografis terletak antara 6<sup>o</sup> 00' sampai 6<sup>o</sup> 20' Lintang Selatan dan 106<sup>o</sup> 20' sampai 106<sup>o</sup> 43' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok.
- Sebelah Timur : Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta.
- Sebelah Barat : Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.

Dengan topografi daerah yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0-3% menurun ke Utara, secara umum Kabupaten Tangerang beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 20<sup>o</sup>C hingga 33<sup>o</sup>C dimana dapat ditemui daerah berhawa panas dan sedang, dengan ketinggian antara 25 sampai 85 meter di atas permukaan laut. Daerah yang mempunyai ketinggian antara 0-25 meter di atas permukaan laut meliputi Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadari, Kresek, Kronjo, Pasar Kemis, dan Sepatan.

#### b. Demografis

Penduduk Kabupaten Tangerang hingga tahun 2006 tercatat sebanyak 3.435.205 jiwa atau naik sebanyak 117.874 jiwa (3,55%) dibandingkan tahun

2005 (sebanyak 3.317.331 jiwa, sesuai survei penduduk antarsensus (SUPAS). Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduknya 2.782.896 jiwa, dengan demikian pada tahun 2006 jumlah penduduk mengalami laju pertumbuhan yang cukup pesat sekitar 3,57% pertahun dalam kurun 6 tahun terakhir.

Kecenderungan penduduk yang terus bertambah dari waktu ke waktu, tentunya bukan hanya disebabkan penambahan penduduk secara alamiah, tapi tidak terlepas dari kecenderungan migrasi masuk karena daya tarik Kabupaten Tangerang yang merupakan daerah tujuan pencari kerja dengan adanya sentra industri, perdagangan maupun jasa. Profil sosial masyarakat dapat ditentukan oleh tingkat kepadatan penduduk suatu daerah atau wilayah. Namun demikian, tingkat kepadatan yang ideal di suatu daerah tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tergantung pada potensi yang dimiliki dan kemampuan penduduk di daerah tersebut dalam memanfaatkan potensi yang ada.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menyadari bahwa ukuran kepadatan penduduk suatu daerah akan lebih bermakna bila dikaitkan dengan potensi daerah mengingat kondisi penduduk antar kecamatan yang bervariasi. Tingkat kepadatan penduduk mengalami kenaikan dari 2.886 jiwa per-km<sup>2</sup> pada tahun 2004 menjadi 2.988 jiwa per-km<sup>2</sup> pada tahun 2005 dan 3.093 jiwa pada tahun 2006. Tingkat kepadatan yang semakin naik ini semakin mempertegas ketertarikan penduduk terhadap keberadaan Kabupaten Tangerang. Dilihat dari populasi tingkat kepadatan per kecamatan pada tahun 2005, Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi, yaitu masing-masing sebesar 8.410 jiwa dan 8.266 jiwa per-km<sup>2</sup>. Sementara kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah, yaitu Kecamatan Kemiri (1,025 jiwa per-km<sup>2</sup>) dan kecamatan Jambe (1.144 jiwa per-km<sup>2</sup>).

Kabupaten Tangerang, yang secara yuridis formal dibentuk dengan UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, semula terdiri dari 19 kecamatan. Beberapa perubahan status administrasi pemerintahan telah dilakukan, dan kini terdiri atas 26 kecamatan, 77 kelurahan dan 251 desa.

## **B. PEMEKARAN EKS-KARESIDENAN BANTEN MENJADI PROVINSI BANTEN**

### **1. Alasan Pemekaran**

Pemekaran wilayah dapat dilihat dari dua perspektif, yakni perspektif kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dilihat dari perspektif kebutuhan, bahwa suatu wilayah daerah dimekarkan dengan membentuk daerah otonom baru benar-benar didorong oleh adanya kebutuhan masyarakat untuk memberikan dampak yang menyejahterakan masyarakat. Dalam perspektif ini daerah dimekarkan dengan alasan yang rasional dan tujuan mulia agar terpenuhinya indikator-indikator kesejahteraan. Sedangkan dilihat dari perspektif tuntutan, bahwa masyarakat ingin membentuk daerah otonom baru dari daerah induknya lebih didorong oleh tuntutan agar terpenuhinya kepentingan sekelompok masyarakat, khususnya kelompok elite tertentu. Alasan pemekaran wilayah dalam perspektif ini lebih bersifat emosional dan politis.

Wilayah Eks-Karesidenan Banten pada akhir tahun 2000 telah memisahkan diri dan membentuk daerah provinsi baru terlepas dari Provinsi Jawa Barat. Wilayah daerah yang mendukung terbentuknya Provinsi Banten meliputi 4 Kabupaten dan 2 Kota.

Dari aspek geografis keempat kabupaten di wilayah Banten sangat jauh dari pusat ibukota Jawa Barat di Bandung. Jarak terjauh dari Bandung adalah Kabupaten Pandeglang (298 kilometer), selanjutnya disusul berturut-turut kearah yang semakin dekat, yaitu Kabupaten Serang (277 kilometer), Kabupaten Lebak (227 kilometer), dan Kabupaten Tangerang (212 kilometer). Dengan rentangan jarak yang terlalu jauh dari pusat pemerintahan, maka akses masyarakat terhadap urusan dan pelayanan pemerintah menjadi sangat lambat dan tidak efisien.

Masyarakat Banten merasa bahwa untuk banyak hal mereka kurang memperoleh pelayanan yang proporsional dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebagai akibat daya jangkauan layanan yang relatif kurang memadai atau terlalu jauh. Hal ini membuat masyarakat Banten kesulitan untuk mengakses sejumlah layanan publik yang mereka butuhkan sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Banten.

Kondisi tersebut mendorong ketidakpuasan masyarakat Banten terhadap kondisi faktual yang mereka hadapi. Untuk ke luar dari jeratan masalah tersebut,

maka selanjutnya masyarakat Banten mencoba untuk mengekspresikannya melalui upaya perubahan, peningkatan dan pemantapan pembangunan di wilayahnya sehingga tingkat kesejahteraan mereka dapat lebih terangkat. Dengan memasuki era demokrasi dan otonomi daerah yang ditandai dengan ditetapkannya UU No. 22/1999 (saat ini telah direvisi menjadi UU No. 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah, masyarakat Banten berupaya agar aspirasi mereka tersebut dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat yang selama ini belum terpenuhi. Hal ini bukanlah kepentingan segelintir elite atau euforia untuk membangun ruang kekuasaan baru, melainkan upaya untuk membangun secara konstruktif dan berkesinambungan masyarakat Banten sehingga dapat mandiri dalam meningkatkan kesejahteraannya sebagaimana yang diharapkan dalam kerangka pembangunan nasional.

Dengan direalisasikannya aspirasi masyarakat Banten maka secara indikatif akan terjadi rentang kendali, koordinasi dan pengelolaan administrasi serta manajemen pemerintahan yang selama ini tersentralisasi dan jauh dari jangkauan masyarakat. Melalui pembentukan provinsi baru masyarakat akan semakin dekat dan mudah untuk mengakses layanan yang menjadi hak setiap warganegara dalam rangka mensejahterakan kehidupannya. Sebaliknya pemerintah Provinsi Banten akan diuntungkan dengan pengelolaan wilayah yang terbatas sehingga dapat berkonsentrasi untuk mengurus dan menjalankan pemerintahan secara efektif, terkoordinasi dan terkendali.

## **2. Proses Pemekaran**

Banten sebagai nama suatu wilayah sudah dikenal dan diperkenalkan sejak abad ke-14. Mula-mula Banten merupakan pelabuhan yang sangat ramai disinggahi kapal dan dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah hingga orang Eropa yang kemudian menjajah bangsa ini. Pada tahun 1330 orang sudah mengenal sebuah negara yang saat itu disebut Panten (Banten), yang kemudian wilayah ini dikuasai oleh Majapahit di bawah Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Pada masa-masa itu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Demak merupakan dua kekuatan terbesar di Nusantara. Tahun 1524–1525 para pedagang Islam berdatangan ke Banten dan saat itulah dimulai penyebaran agama Islam di Banten. Sekitar dua abad kemudian berdiri Kadipaten Banten di Surasowan pada

8 Oktober 1526. Pada 1552–1570 Maulana Hasanudin Panembahan Surosowan menjadi Sultan Banten pertama. Sejak itu dimulailah pemerintahan kesultanan di Banten yang diakhiri oleh Sultan Muhammad Rafi'uddin (1813–1820) merupakan sultan ke dua puluh setelah sultan dan rakyat masa sebelumnya berperang melawan penjajah. Namun demikian perjuangan rakyat Banten terus berlanjut hingga detik terakhir kaki penjajah berada di bumi Banten.

Pembentukan Provinsi Banten sebagai hasil pemekaran Eks-Karesidenan Banten, yang berdiri sendiri lepas dari Provinsi Jawa Barat, memberikan pengalaman perjuangan yang panjang, dramatik, dan membanggakan bagi masyarakatnya. Bukti historis menunjukkan, bahwa keinginan masyarakat Banten untuk membentuk provinsi yang berdiri sendiri terlepas dari bagian Provinsi Jawa Barat sudah sangat lama. Lubis dalam Setda Provinsi Banten (2003:3), menerangkan bahwa usaha mendirikan Provinsi Banten sudah dimulai sejak tahun 1953, tetapi usaha pertama ini gagal. Pada tahun 1963 beberapa tokoh Banten membentuk Panitia Pembentukan Provinsi Banten dengan Ketua Gogo Sandjadirdja, usaha inipun mengalami kegagalan. Pada masa Orde Baru, tahun 1967 tuntutan untuk berdirinya Provinsi Banten marak lagi. Terhadap usaha ini, pihak keamanan bertindak represif. Pada tahun 1970 dibentuk Presidium Panitia Pusat Provinsi Banten, dengan Ketua Penasehat Prof. Dr. Ir. Bachtiar Rivai, tapi usaha inipun kandas, karena Gubernur Jawa Barat, saat ini Solihin G.P. tidak bersedia melepaskan Banten.

Pengalaman historis tersebut, setelah Presiden Soeharto lengser, memberikan motivasi politik yang sangat kuat bagi masyarakat Banten. Melalui tokoh-tokohnya, baik yang ada di dalam maupun di luar Banten, pada tanggal 4 Februari 2000, usaha yang lebih serius dilakukan, yakni dengan membentuk Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten (Bakor-Banten), dengan Ketua Umum Dewan Penasehat H. Tubagus Chasan Sohib, Ketua Perkumpulan Pendekar (Jawara) Banten. Para ketua atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang ada di Banten direkrut menjadi anggota Bakor-Banten. Ada 137 orang direkrut, misalnya dari unsur HMI, KAHMI, GP Ansor, Fatayat NU, Persis, KNPI, Kadinda, ICMI, Kosgoro, dan lain-lain. Jumlah anggota Bakor-Banten

menjadi sangat banyak, dan hal itu dimaksudkan sebagai upaya untuk mengakomodasi berbagai kekuatan unsur masyarakat.

Pada era reformasi perjuangan masyarakat Banten semakin gigih, karena mulai terasa semilirnya angin demokrasi dan isu tentang otonomi daerah. Pada 18 Juli 1999 diadakan Deklarasi Rakyat Banten di Alun-Alun Serang yang kemudian Badan Pekerja Komite Panitia Provinsi Banten menyusun Pedoman Dasar serta Rencana Kerja dan Rekomendasi Komite Pembentukan Provinsi Banten (PPB). Sejak itu mulai terbentuk Sub-sub Komite PPB di berbagai wilayah di Banten untuk memperkokoh dukungan terbentuknya Provinsi Banten.

Proses politik di masyarakat terus berlanjut. Seminar Nasional bertajuk "Memprotes Proyeksi Terwujudnya Provinsi Banten" di Anyer berhasil menyusun Kelompok Kerja PPB yang diketuai oleh Dr. HM. Irsyad Djuwaeli. Selanjutnya dibentuk Sub-sub Komite Pembentukan Provinsi Banten (SKPPB) di Kabupaten-kabupaten Eks-Karesidenan Banten. Tanggal 11 Agustus 1999 terbentuk SKPPB Kabupaten Pandeglang, dengan ketua Drs. Aceng Ishak. Pada tanggal 20 September 1999 terbentuk SKPPB Daerah Bandung Raya dan Kabupaten Serang, diketuai H. Muslim Djamaludin. Terbentuk pula SKPPB Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon pada tanggal 2 November 1999, dengan ketua H. Tamin H.R. SKPPB Kabupaten Lebak akhirnya juga terbentuk pada 30 Desember 1999. Disamping SKPPB, terbentuk Forum Masyarakat Tangerang Banten (Formatang) pada tanggal 4 Desember 1999. Pada tanggal 4-5 Desember 1999 diselenggarakan Musyawarah Komite PPB yang menghasilkan pokok-pokok pikiran tentang PPB dan Deklarasi Nasional PPB, dengan ketua Drs. H. Jajat Mujahidin. Masing-masing SKPPB dan berbagai forum secara konsisten melakukan sosialisasi dan konsolidasi masyarakat untuk mendukung terbentuknya Provinsi Banten.

Proses politik dilanjutkan dengan proses yuridis. Pada tanggal 7 Desember 1999 Tim Pokja bersama Persiapan PPB menyurati Ketua DPRD untuk audiensi, meminta Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan tentang PPB, dan meminta Menteri Negara Otda segera mengundang RUU pembentukan Provinsi Banten. Pada saat itu, DPRD Kabupaten Lebak mengeluarkan SK dukungan atas PPB. Walikota Cilegon pun mengirim surat kepada Pimpinan DPR RI untuk

merekomendasikan PPB. Disusul kemudian, DPRD Kabupaten Serang mengeluarkan SK dukungan atas PPB pada tanggal 13 Desember 1999. Sehari berikutnya, DPRD Kota Cilegon melakukan hal yang sama, mendukung keberadaan PPB. Pada 22 Januari 2000 DPRD Kabupaten Tangerang mengeluarkan pernyataan dukungan atas PPB.

Titik terang terbentuknya Provinsi Banten mulai muncul ketika pada tanggal 9 Januari 2000 Ketua DPR RI Akbar Tandjung di Serang memberikan pernyataan menyetujui PPB. Selanjutnya, pada 21 Januari 2000, aspirasi PPB disampaikan kepada Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) di Serang dan Pandeglang. Gus Dur minta orang Banten melalui jalur konstitusional dalam perjuangan PPB. Akhirnya, pada tanggal 24 Januari 2000 RUU Inisiatif PPB diusulkan oleh 52 anggota DPR RI kepada Pimpinan DPR RI. Pada tanggal 14 Februari 2000 Rapat Paripurna DPR RI digelar untuk menerima penjelasan pengusul inisiatif RUU pembentukan Provinsi Banten. Seminggu kemudian, 21 Februari 2000, fraksi-fraksi di DPR RI memberikan tanggapan atas usul RUU Inisiatif tersebut.

Pada tanggal 5 Juli 2000, DPOD membahas PPB untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden. Mendagri membalas surat Wakil Ketua DPR RI dan DPOD segera bersidang memfinalkan keputusan tentang PPB pada tanggal 13 Juli 2000. Pada tanggal 18 Juli 2000, sekitar 500 tokoh Banten bertemu Gus Dur di Bina Graha. Presiden menyatakan sudah menandatangani hasil kerja DPOD. Pada tanggal 5 September 2000, Mendagri/Otda bersama DPOD mengadakan peninjauan lapangan di Pandeglang didampingi Tim Bakor PPB.

Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan akhirnya pada 4 Oktober 2000 Rapat Paripurna DPR-RI mengesahkan RUU Provinsi Banten menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengesahkan UU No. 23 Tahun 2000 tentang PPB. Sebulan setelah itu pada 18 Nopember 2000 dilakukan peresmian Provinsi Banten dan pelantikan Pejabat Gubernur H. Hakamudin Djamal untuk menjalankan pemerintah provinsi sementara waktu sebelum terpilihnya Gubernur Banten definitif. Pada tahun 2002 DPRD Banten memilih Dr. Ir. H. Djoko Munandar, MEng dan Hj. Atut



Chosiyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pertama (Biro Pemerintahan Setda Prov. Banten, 2003).

### **3. Hasil/Dampak Pemekaran**

Dengan disahkannya Undang-undang Pembentukan Provinsi Banten, maka di satu sisi Provinsi Jawa Barat wilayah daerahnya menjadi berkurang, tetapi di sisi yang lain berarti pula beralihnya sebagian tanggung jawab pengelolaan daerah yang sudah menjadi provinsi baru. Sebaliknya, Provinsi Banten sebagai provinsi yang baru terbentuk memiliki kewenangan dan beban tanggung jawab untuk mengelola segala potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah sebenarnya yang menjadi harapan dan keinginan rakyat menuntut suatu daerah menjadi daerah otonom baru.

Berbagai capaian pemerintah Provinsi Banten sejak terbentuknya akan dipaparkan secara singkat berdasarkan data yang tersedia. Aspek-aspek yang dideskripsikan meliputi perkembangan kinerja pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, layanan publik bidang pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, dan pengentasan kemiskinan.

#### **a. Perekonomian**

Untuk mengukur kinerja bidang ekonomi suatu daerah provinsi pada umumnya digunakan acuan berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB Perkapita. PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi yang dijadikan indikator dalam PDRB mencakup sembilan lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas, dan air bersih, (5) bangunan, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa.

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB dapat dilihat dari 3 sisi pendekatan: produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Ketiganya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sektor ekonomi, komponen penggunaan dan sumber pendapatan. PDRB dari sisi produksi merupakan penjumlahan seluruh nilai

tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Adapun dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Selanjutnya dari sisi pendapatan, nilai tambah merupakan jumlah dari upah/gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto yang diperoleh.

PDRB disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan “harga konstan”. PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga tahun berjalan sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan data harga tahun tertentu (saat ini menggunakan dasar harga tahun 2000).

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) didapat dari perhitungan PDRB. LPE diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke- $n$  terhadap nilai pada tahun ke  $n-1$ , dibagi dengan nilai pada tahun ke  $n-1$ , kemudian dikalikan dengan 100 persen. LPE menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu terhadap waktu sebelumnya.

PDRB perkapita adalah salah satu indikator makro yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas penduduk di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB perkapita merupakan PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Total Produksi barang dan jasa yang dihasilkan para pelaku ekonomi di Banten dicerminkan oleh besaran angka PDRBnya.

PDRB Provinsi Banten tahun 2002 sebesar Rp 49,44 trilyun dan meningkat rata-rata sebesar 5,51% dalam kurun waktu lima tahun terakhir menjadi Rp 61,28 trilyun di tahun 2006. Semakin membaiknya kinerja PDRB ini merupakan hasil kerja sama seluruh elemen di Provinsi Banten, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Secara riil PDRB Banten antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 4.a.

Tabel 4.a  
PDRB Provinsi Banten atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Tahun 2003-2005 (dalam ribuan Rupiah)

Tahun	2003	2004	2005
<b>PDRB</b>	<b>51.957.457,74</b>	<b>54.880.406,51</b>	<b>58.106.948,23</b>
Kenaikan	5,07%	5,63%	5,88%

Sumber: Banten Dalam Angka Tahun 2006.

Peningkatan perekonomian Provinsi Banten sebagaimana terlihat pada tabel di atas, menunjukkan bahwa terjadi kenaikan produksi barang dan jasa di berbagai sektor ekonomi, khususnya sektor unggulan, seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan perbankan. Andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Banten disumbangkan sektor listrik, gas, dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, serta pertanian.

Perbandingan Pencapaian PDRB Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 4.b.

Tabel 4.b  
PDRB Provinsi Jawa Barat atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Tahun 2003-2005 (dalam ribuan Rupiah)

Tahun	2003	2004	2005
PDRB	220.965.313,81	233.057.690,94	245.798.061,75
% Kenaikan		5,4%	5,5%

Sumber: Jawa Barat dalam angka 2006

Apabila PDRB Provinsi Banten khususnya untuk tahun 2004 dan 2005 dibandingkan dengan PDRB Provinsi Jawa Barat (sebagai provinsi induk sebelum pemekaran) untuk tahun yang sama, maka pada tahun 2003 PDRB Provinsi Banten baru 23,51%, pada 2004 sebesar 23,55%, dan 2005 sebesar 23,64% dari PDRB Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, dilihat dari peningkatan PDRB kedua Provinsi tersebut tidak jauh berbeda, yaitu sekitar 5,5%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten tak jauh berbeda. Meskipun dari segi besarnya PDRB, Provinsi Jawa Barat lebih tinggi. Besarnya PDRB pada Provinsi Jawa Barat tersebut karena ia merupakan daerah yang sudah lama berkembang di samping luas wilayahnya lebih luas daripada Provinsi Banten.

#### b. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Lima tahun terakhir ini, perekonomian Banten telah tumbuh dengan cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan memberikan dampak yang positif, terutama untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi tingkat kemiskinan. Secara berturut-turut pertumbuhan ekonomi Banten dari tahun 2001–2006 adalah, 3,95 persen; 4,11 persen; 5,07 persen; 5,63 persen; 5,88 persen; dan 5,47 persen.

Pertumbuhan ekonomi seperti itu membuktikan, bahwa kinerja ekonomi pemerintah daerah cukup baik. Artinya, bahwa masyarakat daerah beserta aparaturnya telah siap memikul tanggung jawab ekonomi untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Banten di tahun 2005 terutama karena adanya sektor ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor ekonomi tersebut adalah pertanian yang tumbuh dari 2,07 persen pada 2004 menjadi 2,66 persen pada 2005; industri pengolahan dari 4,39 persen menjadi 4,42 persen; listrik, gas dan air bersih dari 5,99 persen menjadi 6,22 persen; perdagangan, hotel dan restoran dari 6,25 persen menjadi 8,84 persen. Demikian juga dengan sektor jasa-jasa yang tumbuh dari 6,10 persen pada 2004 menjadi 6,46 persen pada 2005.

Pertumbuhan di sektor listrik, gas dan air minum dipacu oleh tingginya produksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan baik industri maupun masyarakat. Banyaknya perumahan dan konstruksi lainnya yang terjadi di Banten tahun 2005 memicu pertumbuhan sektor bangunan. Situasi keamanan yang kondusif mampu menarik investor dan menyemarakkan kegiatan ekspor impor. Hal tersebut menjadi pemicu pertumbuhan di sektor perdagangan dan industri.

Pertumbuhan sektor industri terutama didorong oleh tumbuhnya dua kelompok industri yaitu kelompok industri pupuk, kimia dan barang-barang dari karet serta kelompok industri makanan, minuman dan tembakau. Kedua kelompok industri tersebut masing-masing tumbuh 25,50 persen dan 0,82 persen. Sementara kelompok industri yang lain tumbuh negatif. Andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Banten disumbangkan oleh sektor industri pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran; serta pengangkutan dan komunikasi. Masing-masing sektor tersebut menyumbang 2,23 persen, 1,58 persen dan 0,67 persen terhadap total 5,88 persen LPE. Dengan kata lain, sebanyak 76,43 persen pertumbuhan berasal dari ketiga sektor di atas. Sektor pertanian yang merupakan sektor keempat terbesar, dalam hal pertumbuhan hanya menjadi penyumbang terkecil kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten berdampak positif pada PAD, pendapatan asli daerah dalam struktur APBD Provinsi Banten. Berturut-turut

perkembangan PAD dalam APBD 2003 sebesar Rp.614.423.379.332,29 dan dalam APBD 2004 sebesar Rp.832.571.863.829,54, sehingga terjadi kenaikan 35,50%. Sampai saat ini (2006) kontribusi PAD terhadap APBD Banten telah mencapai 70,4%.

Dibandingkan dengan pertumbuhan PAD Provinsi Jawa Barat untuk APBD 2003 sebesar Rp.2.170.593.640.000,36 dan untuk APBD 2004 sebesar Rp.2.846.800.735.000,49 (Jawa Barat dalam angka, 2006). Dengan demikian terdapat kenaikan 31,15%. Ternyata bahwa kenaikan PAD di Provinsi Banten lebih besar daripada Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2003 dan 2004. Dengan demikian, terjadi peningkatan potensi daerah yang signifikan dilihat dari bidang penganggaran.

### c. PDRB Perkapita

Angka PDRB perkapita merupakan indikator kesejahteraan masyarakat secara makro yang dapat dijadikan “cermin” kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi PDRB perkapita yang diterima oleh penduduk berarti semakin tinggi kesejahterannya. Sebaliknya penurunan PDRB perkapita pada suatu daerah, menggambarkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB perkapita Provinsi Banten berdasarkan harga berlaku pada tahun 2005 sebesar 9,09 juta rupiah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB perkapita ini mengalami peningkatan sebesar 12,58 persen.

Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDRB perkapita Banten tahun 2005 sebesar 6,24 juta rupiah, atau tumbuh sebesar 3,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perlu jadi catatan bahwa PDRB perkapita tidak sama dengan pendapatan perkapita. PDRB perkapita hanya menggambarkan NTB (*Number of Trade Business*) yang terbentuk di Banten dibagi dengan seluruh penduduk. Di sini tidak melihat apakah NTB ini milik penduduk Banten atau bukan. Sementara pendapatan perkapita benar-benar menggambarkan NTB yang dimiliki oleh penduduk Banten, baik yang berada di Banten maupun di luar Banten.

Perkembangan kinerja PDRB Perkapita periode 2003-2005 juga mengalami peningkatan. PDRB yang dinikmati secara rata-rata oleh setiap penduduk tersebut menjadi indikator tingkat kemakmuran penduduk Provinsi Banten. PDRB 2003

meningkat menjadi Rp. 5.942.738,00. Tahun 2004 meningkat lagi menjadi Rp. 6.011.802,00. Pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi Rp. 6.242.018,00 (Banten dalam angka, 2005). Kenaikan PDRB Perkapita pertahun berturut-turut 1,2% dan 3,8% atau rata-rata 2,5 %. Adapun PDRB Perkapita Provinsi Jawa Barat pada tahun 2003 sebesar Rp. 5.823.607,80; pada tahun 2004 sebesar Rp. 6.036.063,44; dan pada tahun 2005 sebesar Rp. 6.291.753,89 (Jawa Barat dalam angka, 2006). Kenaikan PDRB Perkapita pertahun berturut-turut 3,6% dan 4,2% atau rata-rata 3,9%. Meskipun kenaikan PDRB Perkapita Provinsi Banten lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat tapi sebagai daerah baru yang mampu meningkatkan PRDR Perkapita merupakan indikator yang signifikan bagi kecenderungan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan ekonomi Provinsi Banten mendorong arus migran dari luar. Mereka bekerja di sektor industri pengolahan, perdagangan, pariwisata (hotel dan restoran). Kedatangan mereka menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk. Pada periode 2001-2005 pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 3,17 persen. Adapun kepadatan penduduk naik sebanyak 31 orang perkilometer persegi. Kepadatan penduduk tersebut dipicu oleh daya tarik Provinsi Banten yang menyediakan lapangan kerja dan makin kondusifnya kesempatan berusaha.

Mengenai ketenagakerjaan dapat dideskripsikan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan mereka yang mencari pekerjaan. Sedangkan mereka yang bekerja mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten belum begitu menggembirakan. Hal ini bisa saja terkait dengan perkembangan kondisi perekonomian nasional yang masih belum terlepas dari jerat krisis ekonomi. Tabel 5 di bawah ini menunjukkan kondisi ketenagakerjaan Provinsi Banten tersebut.

Tabel 5  
Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Banten 2003-2006

Kategori Angkatan Kerja	Satuan	2003	2004	2005	2006
Penduduk Usia Kerja di Atas 15 Th	Jiwa	6.067.868	6.138.507	6.139.367	6.669.311
Angkatan Kerja 15 th	Jiwa	3.699.044	3.839.416	3.864.831	3.974.206
Penduduk Bekerja	Jiwa	3.181.976	3.289.823	3.314.836	3.378.169
Angkatan Partisipasi Kerja	%	60,96	63,54	53,99	50,65
Pengangguran	Jiwa	517.068	549.593	549.996	596.037
Angka pengangguran	%	13,97	14,31	14,23	15,00
Tingkat Penyerapan Angkatan kerja	%	86,02	85,69	85,77	85,82

Sumber: LAKIP Provinsi Banten 2006.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penduduk usia kerja di atas 15 tahun terus mengalami peningkatan, diikuti oleh peningkatan angkatan kerja penduduk di atas 15 tahun. Penduduk bekerja juga mengalami peningkatan, namun jumlah peningkatan tidak sebanding dengan jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja. Hal ini mengakibatkan angka partisipasi kerja semakin menurun. Ketika angka partisipasi kerja menurun, maka pengangguran semakin naik. Dengan demikian yang perlu dicermati ke depan dalam kaitan dengan ketenagakerjaan adalah partisipasi terhadap penduduk di atas usia 15 tahun yang akan memasuki angkatan kerja, sehingga pengangguran terbuka tidak terjadi.

#### d. Bidang Pendidikan

Pendidikan sebagai modal sosial (*social capital*) memiliki peran menentukan bagi perkembangan daerah di masa depan. Pendidikan yang berhasil merupakan modal untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Oleh sebab itu, penduduk yang berkualitas pendidikan yang baik akan mampu membangun daerahnya untuk maju dan berkembang mengikuti dinamika perubahan yang semakin cepat. Semenjak menjadi daerah otonom, berdasarkan LAKIP Provinsi Banten 2006, kondisi pendidikan di Provinsi Banten mengalami peningkatan yang memadai. Hal itu dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6  
Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Tamatan Periode 2001-2005

No	Tamatan	2001	2002	2003	2004	2005
1	Belum Tamat SD	2.130.671	1.958.461	1.977.693	1.913.256	1.862.117
2	SD/Sederajat	1.905.305	2.110.440	2.328.375	2.293.094	2.396.761
3	SMP/Sederajat	920.856	1.092.626	1.146.367	1.249.919	1.264.767
4	SMA/Sederajat	1.119.914	1.212.880	1.279.654	1.405.924	1.481.555
5	D-1 dan D-2	37.774	46.152	52.445	48.152	411.495
6	D-3 ke atas	220.492	307.695	222.664	216.101	
<b>Jumlah</b>		<b>6.335.012</b>	<b>6.728.254</b>	<b>7.007.198</b>	<b>7.126.446</b>	<b>7.416.695</b>

Sumber: LAKIP Provinsi Banten 2006.

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan penduduk Banten usia 10 tahun ke atas sebagian besar hanya tamat sekolah dasar dan yang belum/tidak tamat SD/Sederajat, yang besarnya sekitar 57,43 persen meliputi mereka yang tamat SD/Sederajat sebanyak 32,32 persen dan yang tidak/belum tamat SD/Sederajat sebesar 25,11 persen. Pada tingkat sekolah menengah/lanjutan, yang telah menamatkan pendidikan setingkat SLTP sebesar 17,05 persen dan yang tamat SLTA sebesar 19,98 persen. Untuk jenjang pendidikan tinggi persentasenya lebih rendah lagi dimana hanya sekitar 5,2 persen yang berhasil menamatkan pendidikan setingkat diploma I sampai Sarjana. Kondisi ini cukup memprihatinkan dan kritis bila dikaitkan dengan kecenderungan bergesernya tuntutan pasar kerja (sektor formal) yang lebih mengutamakan pendidikan serendah-rendahnya SLTA sebagai prasyarat bagi angkatan kerja dalam mengikuti kompetisi di bursa pasar kerja.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang mendasar bagi perbaikan seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Peningkatan kinerja bidang pendidikan diantaranya melalui capaian angka partisipasi sekolah (APS), baik Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM). Pada tahun 2006 APS di Provinsi Banten mengalami peningkatan yang berarti. Misalnya, APK pada sekolah dasar terjadi peningkatan dari 110,44 di tahun 2005 menjadi 110,110,67 pada tahun 2006. APK pada satuan pendidikan lanjutan pertama dari 85,28 menjadi 88,75, dan pada satuan pendidikan lanjutan atas dari 54,74 menjadi 55,20.

Pemerataan kesempatan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, perpustakaan dan buku-



buku penunjang pelajaran serta tenaga pendidik (guru) yang memadai. Untuk tingkat sekolah dasar ada sebanyak 4.316 buah SD dengan 1.215.389 siswa dan 41.715 guru, sehingga terhitung rasio guru-murid sebesar 29,14 yang artinya setiap 1 (satu) orang guru membimbing sekitar 29 orang siswa.

Pada tingkat Sekolah Menengah/Lanjutan Pertama terdapat sebanyak 662 sekolah dengan kapasitas murid yang mengikuti pendidikan sebanyak 326.073 siswa dan tenaga pengajar (guru) sebanyak 13.496 orang atau rasionya sekitar 24,16. Selanjutnya jumlah Sekolah Lanjutan Atas terdapat 480 sekolah yang terdiri dari 296 SMU dan 184 SMK (sekolah kejuruan) dengan jumlah siswa keseluruhan sebanyak 217.806 orang, meliputi mereka yang sekolah di SMU sebanyak 125.108 (57,44 persen) yang lainnya sebanyak 92.698 (42,56 persen) bersekolah di SMK. Tenaga pendidik di kedua jenis pendidikan tersebut sebanyak 12.222 orang terdiri atas guru SMU sebanyak 7.146 orang (58,47 persen) dan 5.076 orang (41,53 persen) sebagai guru SMK. Secara keseluruhan rasio guru-murid sebesar 17,82 atau setiap 1 (satu) orang guru mengajar sekitar 17-18 orang siswa.

Sampai saat ini (tahun 2005), di Banten terdapat sekitar 282.576 (3,81 persen) penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf). Angka ini sebenarnya dapat lebih besar seandainya melek huruf dibatasi hanya untuk mereka yang dapat membaca dan menulis huruf latin saja (tidak termasuk mereka yang hanya dapat membaca dan menulis huruf lainnya seperti Arab, China dan sebagainya). Dari sini jumlah penduduk yang buta huruf menjadi sebanyak 371.014 orang (5,0 persen), sehubungan penduduk yang hanya bisa membaca dan menulis huruf lainnya tercatat sekitar 88.438 orang (1,19 persen) juga dianggap sebagai "buta huruf latin".

#### **e. Bidang Kesehatan**

Salah satu unsur kesejahteraan yang sekaligus juga merupakan kebutuhan dasar manusia adalah kesehatan. Kualitas layanan di bidang kesehatan merupakan unsur yang penting untuk menilai kemampuan pemerintah memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Layanan kesehatan ini mencakupi indikator ketersediaan fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang ada di daerah. Dibandingkan dengan jumlah penduduk yang begitu besar, maka jumlah fasilitas

kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di Banten sampai tahun 2005 masih kurang memadai. Sampai tahun 2005, dokter secara keseluruhan hanya terdapat 1.876 orang yang terdiri atas: 1.016 dokter umum, 575 dokter ahli (spesialis) dan 285 orang dokter gigi. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk (9.308.944 jiwa) yang harus dilayani, maka rasio dokter dan penduduk adalah 1:9.163; 1:16.190; dan 1:32.663.

Pada tahun 2005 sebanyak 216.210 bayi telah menerima imunisasi BCG, 202.649 mendapat imunisasi DPT-III, 208.224 memperoleh imunisasi campak dan Polio-IV diberikan kepada sekitar 165.381 anak (bayi).

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, yang dilihat dari banyaknya jumlah Puskesmas (termasuk Puskesmas Pembantu) dan rumah sakit (rumah sakit umum daerah dan swasta) di Provinsi Banten terus meningkat. Berdasarkan data Bappeda, jumlah rumah sakit tahun 2006 dibanding tahun 2005 tidak mengalami perubahan, yaitu sejumlah 49 buah. Sedangkan jumlah Puskesmas dari tahun 2005 mengalami peningkatan dari 427 buah menjadi 436 buah, atau mengalami peningkatan sebanyak 9 buah (2,11%). Rasio Rumah Sakit dan Puskesmas dibanding jumlah penduduk 2006 masing-masing adalah 1:37.558 dan 1:21.499. Disamping ketersediaan sarana kesehatan, ketersediaan prasarana kesehatan seperti pedagang besar farmasi juga perlu mendapat perhatian. Pedagang besar farmasi yang berfungsi sebagai distributor maupun penyalur obat-obatan termasuk apotik sangat dibutuhkan.

Jumlah pedagang besar farmasi pada tahun 2005 terdapat sebanyak 74 buah terbatas hanya di Kabupaten Tangerang (58 buah), Serang (4 buah) dan Kota Tangerang (12 buah). Sedangkan apotik terdapat sebanyak 476 buah tersebar di setiap kabupaten/kota dengan jumlah terbesar terdapat di Kabupaten Tangerang (245 buah) dan Kota Tangerang (145 buah), adapun jumlah terkecil terdapat di Kabupaten Pandeglang yaitu 5 buah. Keberadaan dan ketersediaan obat-obatan sangat dipengaruhi oleh keberadaan industri farmasi baik dalam skala besar maupun kecil. Industri farmasi di Banten pada tahun 2005 terdapat sebanyak 35 buah.

Indikator keberhasilan kinerja bidang kesehatan diantaranya juga dilihat pada peningkatan gizi masyarakat. Data mutakhir tahun 2006 menunjukkan

bahwa di Banten terdapat 886.011 balita yang berstatus gizi baik atau 90,27 persen dari bayi yang ditimbang, sedangkan pada tahun sebelumnya balita yang berstatus gizi baik sebanyak 751.892 atau 87,86 persen (LAKIP Provinsi Banten 2006).

Partisipasi sekolah yang dikombinasikan dengan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik akan meningkatkan Indeks Mutu Hidup (IMH). Indeks Mutu Hidup dapat dikategorikan dan diwakilkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan konsep gabungan dari indikator angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil perkapita masyarakat. Selain itu IMH dapat dijadikan sebagai indikator lain dalam mengukur kualitas kehidupan masyarakat, yaitu semakin tinggi nilai IMH maka semakin tinggi pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

IMH Provinsi Banten selama periode tahun 2002-2005 terus mengalami peningkatan. Gambaran secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7  
IMH Provinsi Banten Tahun 2002-2005

Tahun	Indeks IMH	% Kenaikan/Penurunan
2002	66,20	-
2003	67,20	1,51
2004	67,50	0,45
2005	67,90	0,59

Sumber: LAKIP Provinsi Banten 2006.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa IMH pada tahun 2002 adalah sebesar 66,20 dan pada tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi 67,90. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode ini telah terjadi peningkatan mutu hidup masyarakat yang cukup signifikan untuk Provinsi Banten.

#### e. Pertahanan Keamanan dan Kriminalitas

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur rasa aman masyarakat adalah penelitian korban kejahatan baik melalui survei maupun laporan instansi terkait. Semakin banyak anggota masyarakat yang menjadi korban kejahatan berarti makin rendah derajat keamanan yang mereka rasakan dan berlaku sebaliknya.

Kesulitan ekonomi yang berkepanjangan pada masyarakat, kesulitan memperoleh bahan pangan, kesulitan mencari pekerjaan yang berdampak membengkaknya angka pengangguran dan berbagai kesulitan lainnya diduga dapat meningkatkan tindak kejahatan (kriminalitas) ditengah-tengah masyarakat yang berarti pula menyebabkan turunnya derajat keamanan.

Dengan hanya bersumber dari laporan Polisi Wilayah (Polwil) Banten, pada tahun 2005 ditemukan sebanyak 1.435 tindak kejahatan dengan berbagai motif. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2004 yang tercatat sebanyak 1.106 kejadian atau mengalami peningkatan sekitar 29,75 persen. Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang menduduki peringkat pertama adalah kasus pencurian bermotor (Curanmor) sebanyak 406 kasus, disusul kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) sebanyak 312 kasus. Hal ini diperkirakan akan lebih banyak lagi seandainya setiap bentuk kejahatan sekecil apapun yang dialami masyarakat dilaporkan kepada pihak berwajib.

Sementara dari seluruh kejadian di atas, jumlah penyelesaian tindak pidananya pada tahun 2005 hanya mencapai 680 untuk seluruh kasus atau sekitar 47,39 persen (lihat tabel 8).

Tabel 8  
Banyaknya Tindak Kejahatan yang Terjadi Menurut Jenis Kejahatan di Banten 2005

Tindak Kejahatan	Jenis Kejahatan	
	Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana
(1)	(2)	(3)
1. Pencurian dengan kekerasan (Curas)	86	33
2. Pencurian dengan pemberatan (Curat)	312	219
3. Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor)	406	51
4. Penganiayaan/ <i>Torture</i>	179	113
5. Penipuan/ <i>Cheated</i>	283	98
6. Penggelapan/ <i>Fraud</i>	106	52
7. Narkotika/ <i>Narcotics</i>	63	114
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1.435</b>	<b>680</b>
<b>2004</b>	<b>1.106</b>	<b>577</b>
<b>2003</b>	<b>920</b>	<b>552</b>
<b>2002</b>	<b>1001</b>	<b>568</b>
<b>2001</b>	<b>1.113</b>	<b>658</b>

Sumber : Provinsi Banten Dalam Angka, 2005

Namun pada prinsipnya gangguan keamanan dan ketertiban umum yang terjadi di Provinsi Banten selama tahun 2001 sampai tahun 2005 tidak terlalu mengganggu kinerja pembangunan pemerintah provinsi pada bidang lainnya.

Meskipun secara rata-rata terdapat kenaikan jumlah gangguan yang berdampak terhadap aspek keamanan dan aspek kestabilan daerah, namun kenaikan jumlah tersebut semakin memberikan pengalaman pada pemerintah provinsi untuk lebih dewasa menyikapinya.

#### **f. Solidaritas Masyarakat**

Setelah pemekaran sampai saat ini, Provinsi Banten tidak mengalami gejolak atau konflik horisontal. Sampai saat ini tidak ada konflik yang berbau SARA. Kondisi ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat relatif stabil dan kondusif. Kondisi demikian merupakan syarat mutlak bagi dapat terselenggaranya program pembangunan di Provinsi Banten.

Faktor yang menjadikan Provinsi Banten sebagai provinsi baru yang relatif stabil dan solid sistem sosialnya adalah adanya latar belakang sejarah, kesamaan sosial budaya, dan rasa senasib sepenenderitaan masyarakatnya, dan relatif baiknya perkembangan budaya urban pada masyarakat suburban yang terbentuk di pinggiran pusat-pusat kota. Masyarakat Banten telah mempunyai sejarah yang panjang sejak zaman kerajaan Padjadjaran, zaman kesultanan Demak, zaman kesultanan Banten, di bawah pemerintah kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan.

Masyarakat Banten dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, telah menghadapi berbagai peristiwa politik dan sosial yang menyebabkannya menjadi suatu kesatuan masyarakat yang relatif homogen dalam gagasan dan konstruk berpikir. Hal ini terbentuk karena pengalaman dari dulu sampai sekarang. Orang Banten pernah menjadi penguasa politik di bagian barat pulau Jawa pada abad ke-16-18. Mereka lalu dihancurkan oleh kekuatan asing dengan dibubarkannya kesultanan Banten oleh Belanda. Akan tetapi, mereka terus berjuang untuk menjadi bangsa yang merdeka.

Perjalanan panjang tersebut telah membentuk identitas orang Banten dengan nilai-nilai budaya dan sistem sosial yang relatif homogen. Secara umum, masyarakat Banten dapat dibedakan dengan masyarakat Sunda. Ekspresi orang Banten lebih keras daripada orang Sunda dilihat dari ekspresi seni dan perilakunya. Hal ini tampak dari seni silat dan seni lainnya. Seni silat Banten lebih bergaya laga sedangkan seni silat Sunda lebih mementingkan keindahan gerak.

Seni musik Banten lebih dinamis daripada seni musik Sunda yang lebih menyayat-nyayat hati (*ngangeres*).

Di samping itu, pertumbuhan masyarakat urban di Banten juga relatif matang. Masyarakat urban yang tumbuh di sekitar pusat-pusat perkotaan berkembang mengikuti pola masyarakat patembayan, *geselchaft*: heterogen, multikultural, toleran, menjunjung tinggi hukum positif, dan asosiatif. Hal ini juga memberi sumbangan yang signifikan bagi terbentuknya soliditas kesatuan masyarakat hukum Provinsi Banten yang terbentuk sebagai akibat dari pemekaran daerah tersebut.

#### g. Bidang Politik dan Aspirasi Masyarakat

Pencapaian sasaran program atau kegiatan pemerintah Provinsi Banten dalam pembinaan organisasi politik sejak tahun 2002-2006 meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya pemerintah provinsi yang berbenah untuk menjadi dewasa, tetapi masyarakat Provinsi Banten pun berusaha menjadi dewasa. Salah satunya melalui pembelajaran politik. Tampak pada tabel 9 tingkat partisipasi masyarakat Provinsi Banten dalam organisasi politik meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 9  
Tingkat Partisipasi Masyarakat Provinsi Banten dalam Organisasi Politik  
2002-2006

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2002	2003	2004	2005	2006
1	Parpol Lolos Verifikasi	Buah	42	42	46	46	46
2	Parpol Peserta Pemilu	Buah	15	15	24	24	24

Sumber: LAKIP Provinsi Banten 2006.

Untuk lebih mewujudkan pemerintah Provinsi Banten yang lebih demokratis, pemerintah harus lebih terbuka untuk menerima masukan pendapat dari berbagai sumber. Salah satunya dari arus bawah (masyarakat) dalam bentuk unjuk rasa. Hal itu terlihat dari adanya kenaikan jumlah unjuk rasa dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir. Sebagian besar unjuk rasa mengusung aspirasi masyarakat dalam bidang sosial budaya, dilanjutkan ekonomi, kemudian politik sebagai berikut.

Tabel 10  
Jumlah Aspirasi Masyarakat (Unjuk Rasa) Provinsi Banten 2002-2006

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2002	2003	2004	2005	2006
1	Politik	Kali	-	5	4	12	33
2	Ekonomi	Kali	-	-	2	11	51
3	Sosial Budaya	Kali	-	44	14	142	83
4	Hukum	Kali	-	-	-	-	8
Jumlah		Kali	-	49	20	165	175

Sumber: LAKIP Provinsi Banten 2006.

#### h. Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan masyarakat di Provinsi Banten masih menjadi masalah. Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dan berbagai faktor yang cukup kompleks menimbulkan dampak pada meningkatnya jumlah angka kemiskinan. Berdasarkan laporan Lakip Provinsi Banten, 2006; pada tahun 2002 penduduk miskin di Banten berjumlah 786.700 (9,22%); pada tahun 2003 penduduk miskin di Banten meningkat menjadi 855.900 (9,56%); pada tahun 2004 penduduk miskin di Banten menurun menjadi 779.100 (8,58%); pada tahun 2006 penduduk miskin di Banten meningkat kembali menjadi 966.700 (10,32%). Kondisi ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Provinsi Banten mengingat kemiskinan akan memiliki dampak yang cukup luas, antara lain pendidikan, kesehatan, dan akhirnya kualitas sumber daya manusia.

### C. PEMEKARAN KOTA ADMINISTRATIF DEPOK MENJADI KOTA DEPOK

#### 1. Alasan Pemekaran

Wilayah administrasi Depok letaknya sangat strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) dan merupakan wilayah penyangga untuk meringankan tekanan penduduk DKI Jakarta sebagai ibukota negara. Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) di mana Depok merupakan bagian dari wilayah Bogor. Dalam perkembangannya Depok bukan saja merupakan pusat pemukiman tetapi telah tumbuh pula sebagai kota perdagangan, jasa, dan pendidikan.

Perkembangan wilayah ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk yang cepat. Pada tahun 1990 Kota Administratif Depok berpenduduk 271.134 jiwa dan pada tahun 1998 telah meningkat menjadi 828.870 jiwa. Setelah ditata menjadi 6 kecamatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 6,75 persen pertahun, mengakibatkan beban bertambah berat dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konstelasi wilayah Jakarta – Bogor – Depok - Tangerang – Bekasi (Jabodetabek), Kota Administratif Depok merupakan wilayah penyangga bagi Ibukota Negara RI DKI Jakarta, sekaligus menjadi wilayah antara (*Buffer-Zone*) dari kawasan resapan air (di daerah selatan, seperti kawasan Bogor dan sekitarnya) dengan kawasan perkotaan (di sebelah utara, seperti DKI Jakarta). Dengan fungsi sebagai daerah penyangga sekaligus sebagai daerah resapan air, pola pemanfaatan ruang dan lahan di Kota Administratif Depok diamankan untuk memperhatikan perbandingan antara luasan kawasan budidaya dengan kawasan lindung. Selain sebagai daerah penyangga, Kota Administratif Depok juga merupakan *counter-magnet* bagi DKI Jakarta. Sebagai *counter-magnet*, aktivitas yang tumbuh dan berkembang di Kota Administratif Depok sedikit banyak merupakan kegiatan perkotaan dan sebagian besar bertumpu pada ketersediaan infrastruktur regional yang menghubungkan Kota Administratif Depok dengan kota-kota lain di sekitarnya.

Memperhatikan tugas dan fungsi yang sedemikian berat tersebut, bagi Kota Administratif Depok, tidak ada pilihan lain kecuali memperbesar kapasitas daerah dengan meningkatkan status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom. Dengan kapasitas sebagai Kota Otonom maka Kota Depok akan memiliki kedudukan sederajat dengan kota-kota lain di sekitarnya dan memiliki keleluasaan untuk mengelola rumah tangganya sendiri, tidak tergantung dari kabupaten induknya, Bogor.

## 2. Proses Pemekaran

Depok bermula dari sebuah kecamatan yang berada dalam lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) Wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada 1976 mulai dibangun perumahan yang berciri perkotaan, baik oleh Perum Perumnas maupun Pengembang perumahan swasta. Lembaga pendidikan tinggi



mulai pula dibangun di wilayah ini, yaitu dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI). Pengaruh perkembangan perumahan dan dunia pendidikan pada gilirannya mampu meningkatkan perdagangan dan jasa yang semakin pesat, sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.

Pada tahun 1981 pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981, yang peresmianya diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri Dalam Negeri (H. Amir Machmud), meliputi wilayah 3 (tiga) kecamatan dan 17 (tujuh belas) desa.

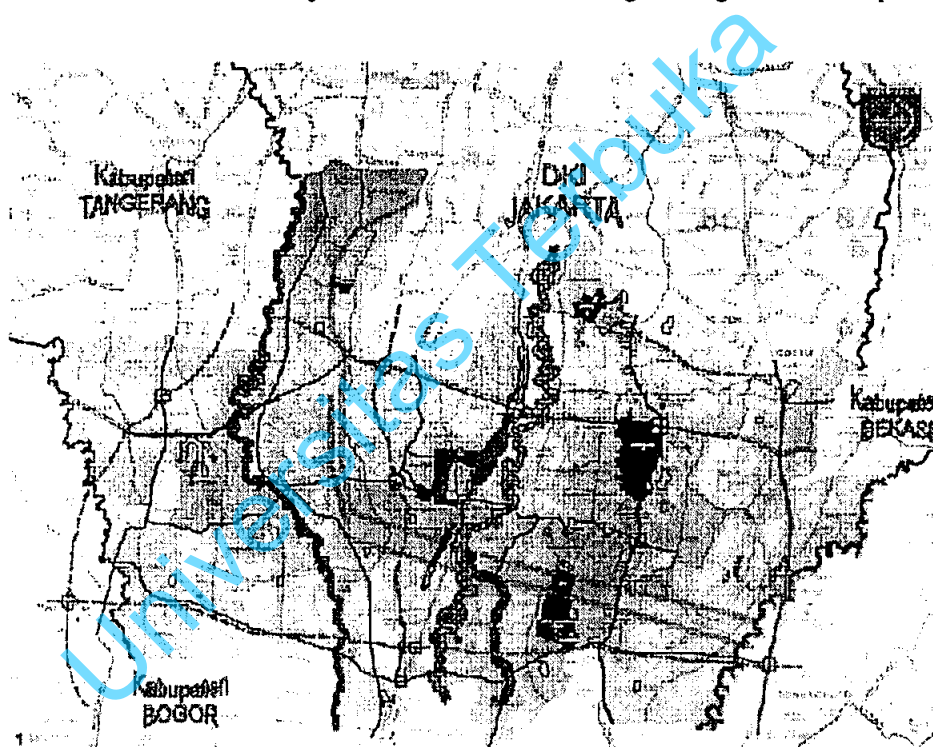
Selama Kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok berkembang dengan pesat baik di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, khususnya bidang pemerintah semua desa berubah menjadi kelurahan dan adanya pemekaran kelurahan, sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan memperhatikan perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, tanggal 16 Mei 1994, Nomor 135/SK.D/03/1994 tentang Persetujuan Pembentukan Kotamadya Depok maka pemekaran Kota Administratif Depok menjadi Kotamadya semakin menjadi kebutuhan. Apalagi setelah secara politik DPRD Provinsi Jawa Barat mengeluarkan persetujuannya pada tanggal 7 Juli 1997 dengan Keputusan No. 135/Kep. Dewan.06/DPRD/1997 tentang Persetujuan Atas Pembentukan Kotamadya Dati II Depok, maka masyarakat semakin mendesak agar Kota Administratif Depok ditingkatkan menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi lebih maksimum.

Dua tahun kemudian kebutuhan pembentukan Kotamadya Dati II telah menjadi kenyataan setelah keluarnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 berbarengan dengan pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999, dalam rangka pengembangan fungsi kotanya sesuai dengan dengan potensi dan keinginan memenuhi kebutuhan masyarakatnya di masa-masa yang akan datang, terutama pengembangan sarana dan prasarana fisik kota, serta untuk kesatuan perencanaan, pembinaan wilayah, dan penduduk yang berbatasan dengan wilayah Kota Administratif Depok maka wilayah Kota Depok dikembangkan mencakupi sebagian wilayah Kabupaten Bogor lainnya. Wilayah Kota Depok saat itu meliputi wilayah Kota Administratif Depok ditambah 3 (tiga) kecamatan lain, yaitu Cimanggis, Sawangan, dan Limo, serta sebagian wilayah Kecamatan Bojonggede.

Peta berikut ini menunjukkan batas-batas dan bagian-bagian Kota Depok.



### 3. Hasil/Dampak Pemekaran

Berbagai capaian pemerintah Kota Depok sejak terbentuknya akan dipaparkan secara singkat berdasarkan data yang tersedia. Aspek-aspek yang dideskripsikan meliputi perkembangan kinerja pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, layanan publik bidang pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, dan pengentasan kemiskinan.

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok tahun 2005 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 19,12 persen dibanding tahun 2004, yaitu dari Rp6.314.197,60,- pada tahun 2004 menjadi Rp 7.521.594,61,- pada tahun 2005. Sedangkan atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 6,92 persen dari Rp4.433.822,90,- tahun 2004 menjadi Rp. 4.740.868,66,- tahun 2005. Ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di Kota Depok mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Namun PDRB Kota Depok dua tahun terakhir atas dasar harga konstan di atas, jika dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Bogor (kabupaten induk sebelum pemekaran) maka PDRB Kota Depok tahun 2004 telah mencapai 238,98% dari PDRB Kabupaten Bogor tahun 2004 yaitu Rp. 1.308.000,39. Sedangkan PDRB Kota Depok tahun 2005 meningkat menjadi 248,34% dari PDRB Kabupaten Bogor tahun 2005 yaitu Rp. 1.361.000,40 (Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Bogor, 2005).

Berdasarkan perhitungan PDRB harga konstan, laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok tahun 2005 mengalami peningkatan, yaitu dari 6,41 persen pada tahun 2004 menjadi 6,93 persen pada tahun 2005, dan LPE tahun 2005 telah melampaui target yang direncanakan dalam RKPD tahun 2006 sebesar 6.54 persen.

Dilihat dari kelompok sektor (lihat tabel 11), semua kelompok mengalami peningkatan. Kelompok sektor yang mengalami peningkatan yang terbesar adalah kelompok sekunder (8,03%) diikuti kelompok tersier (5,90%) dan kelompok primer (4,70%) .

Tabel 11  
 Persentase Pertumbuhan ekonomi Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2001-2005

KELOMPOK SEKTOR – SEKTOR	2001	2002	2003	2004	2005 <sup>x1</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. PRIMER</b>	3.04	3.58	2.23	4.24	4.70
1. Pertanian	3.04	3.58	2.23	4.24	4.70
2. Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-	-
<b>B. SEKUNDER</b>	6.78	7.60	6.88	6.94	8.03
3. Industri Pengolahan	7.04	8.57	7.21	7.27	8.03
4. listrik, Gas & Air Minum	4.20	3.87	5.62	5.66	7.86
5. Bangunan Konstruksi	6.64	3.84	5.54	5.58	2.33
<b>C. TERSIER</b>	5.21	4.76	5.98	6.02	5.90
6. Perdggn Hotel & Restoran	5.59	2.67	5.87	5.91	6.07
7. Pengangktn & Komunikasi	3.73	25.38	6.95	6.34	7.95
8. Bank & Lembaga Keuangan lainnya	5.04	6.69	7.99	8.07	5.69
9. Jasa-jasa	4.77	5.21	4.78	4.83	6.94
<b>PDRB KOTA DEPOK</b>	5.89	6.10	6.29	6.41	6.93

Sumber : Kota Depok Dalam Angka 2006

Jika melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Kota Depok atas dasar harga berlaku menunjukkan kenaikan dari Rp. 4.813.938,49 pada tahun 2004 menjadi Rp. 5.554.989,46 pada tahun 2005 atau meningkat 15,39%. Sedangkan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan naik dari Rp. 3.380.342,53 pada tahun 2004 menjadi Rp. 3.501.315,46,- pada tahun 2005 atau naik 3,58 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan atau konsumsi penduduk Kota Depok juga mengalami peningkatan.

Namun capaian angka di atas, jika dibandingkan dengan PDRB perkapita pada tahun 2000 (saat terakhir Kota Depok bergabung dengan Kabupaten Bogor) berdasarkan harga konstan 1993 yaitu sebesar Rp. 4.461.304,12, maka PDRB perkapita Kota Depok sampai tahun 2005 masih di bawah angka PDRB perkapita sebelum menjadi daerah otonom baru. Dengan perkataan lain, setelah menjadi daerah otonom baru tingkat kesejahteraan masyarakat Depok justru mengalami penurunan bukan peningkatan.

#### b. Bidang Sosial Budaya

Kualitas sumber daya manusia mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan suatu pembangunan. Salah satu indikator adanya usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta ibadah.

### 1) Pendidikan

Tahun Ajaran 2006/2007 di Kota Depok terdapat sekolah SD sebanyak 362 sekolah, dengan jumlah murid 108.403 murid dan jumlah guru sekitar 4.657 orang. Sekolah SMP berjumlah 137 sekolah dengan jumlah siswa 57.839 orang dan jumlah guru 3.117 orang. Di tingkat SMA terdapat 105 sekolah dengan jumlah murid dan guru masing-masing 33.663 orang dan 2.546 orang.

Pada tahun 2005, penduduk Kota Depok yang berumur 10 tahun ke atas memiliki ijazah tertinggi SLTA dan sederajat yaitu 24,61%. Memiliki Ijazah tertinggi SLTA merupakan persentase terbesar dibanding jenjang pendidikan lainnya. Sedangkan menurut kemampuan berbahasa Indonesia, penduduk Kota Depok yang berumur 10 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin 79,95%, huruf lainnya 0,17%, bisa huruf latin dan huruf lainnya 18,58% dan yang buta huruf 1,30%.

### 2) Agama

Tempat ibadah merupakan salah satu sarana yang penting untuk meningkatkan derajat keimanan seseorang. Pada tahun 2006, di Kota Depok terdapat 548 masjid, 1.139 musholla, 6 gereja katolik (tahun 2003), 121 gereja protestan (tahun 2003), dan 2 vihara. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Depok tahun 2006 adalah 133 sekolah dengan jumlah murid 30.420 orang, dan guru 1.581 orang. Sedangkan jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Depok 60 sekolah, dengan jumlah siswa 10.675 orang, dan jumlah guru 1.067 orang. Serta jumlah sekolah Madrasah Aliyah (MA) ada 21 sekolah, dengan jumlah siswa 1.828 siswa, dan 362 guru.

### 3) Kesehatan

Pembangunan kesehatan harus selalu dilakukan mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun, upaya yang dilakukan pemerintah antara lain dengan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah.

Di Kota Depok tahun 2006 tersedia 27 puskesmas yang tersebar di 6 kecamatan dan 10 puskesmas pembantu. Sarana rumah sakit umum juga tersedia

di Kota Depok. Sampai dengan tahun 2006 rumah sakit yang ada di Kota Depok berjumlah 8, rumah sakit ibu dan anak berjumlah 4 rumah sakit.

Saat ini, berdasarkan indikator IPM bidang kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Depok adalah 72,17 tahun. Nilai AHH Kota Depok ini merupakan nilai tertinggi di Jawa Barat, sehingga menggambarkan bahwa tingkat kesehatan penduduk Kota Depok sudah cukup baik. Nilai AHH tersebut merupakan gambaran keberhasilan atas upaya kesehatan yang telah dilaksanakan dan angka ini melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2006 sebesar 67 tahun.

Angka kematian bayi dan angka kematian ibu juga semakin menurun, sehingga berdampak pada membaiknya angka harapan hidup waktu lahir. Selain itu, seiring dengan meningkatnya nilai AHH, maka dalam empat tahun terakhir penurunan angka kematian bayi dan ibu terlihat jelas, yaitu 44,67 pada tahun 2003, 44,01 tahun 2004, 33,38 tahun 2005, dan 33,34 perseribu kelahiran hidup tahun 2006. Angka 33,34 ini masih lebih baik dari rata-rata Jawa Barat, yaitu 43,40. Faktor lain yang mendukung pencapaian AHH yang semakin membaik adalah membaiknya data jumlah kematian maternal (ibu melahirkan) selama periode 2001-2005, yaitu 16, 15, 12, 12, dan 8 orang dari seribu ibu yang melahirkan (Kota Depok Dalam Angka, 2005).

#### **4) Kelembagaan Swadaya Masyarakat**

Sesuai dengan target Renstra Kota Depok pada tahun 2005, telah dilaksanakan pembinaan terhadap 120 orang dari kelembagaan swadaya masyarakat yang memiliki fokus beragam, terutama kelembagaan swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pembangunan daerah. Hal ini mengandung maksud agar tumbuh motivator yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembinaan keswadayaan masyarakat juga dilakukan melalui program penggerakan partisipasi masyarakat kelurahan (P3MK) yang pada tahun 2005 telah disalurkan bantuan keuangan kepada 63 kelurahan sebesar Rp. 3.150.000.000,-. Bantuan stimulan ini dapat menggerakkan swadaya murni masyarakat sebesar Rp. 1.143.000.000,- yang diwujudkan dalam berbagai pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dan sosial.

Program ini mengarah pada terciptanya peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan secara mandiri dan partisipatif.

### **c. Ketenagakerjaan**

Di Kota Depok terdapat 10 (sepuluh) sektor ekonomi yang dapat dijadikan lapangan usaha penduduk, yaitu:

- a. Sektor Pertanian,
- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian,
- c. Sektor Industri,
- d. Sektor Listrik, gas dan air,
- e. Sektor Konstruksi,
- f. Sektor Perdagangan,
- g. Sektor Transportasi dan Komunikasi,
- h. Sektor Keuangan,
- i. Jasa-jasa, dan
- j. Lainnya.

Jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor di atas, mayoritas penduduk di Kota Depok pada tahun 2005 bekerja di sektor jasa-jasa (29,14%), kemudian di sektor perdagangan (27,79%), disektor Industri (15,14%), di sektor transportasi dan komunikasi (6,35%), di sektor keuangan (10,05%), di sektor pertanian (1,44%), di sektor listrik, gas dan air (0,82%), dan yang paling kecil persentasenya adalah di sektor pertambangan dan penggalian, yaitu hanya sebesar 0,55%.

Jika dilihat persentase jenis kelamin menurut lapangan usaha, terlihat bahwa untuk sektor jasa-jasa, persentase perempuan mencapai 37,53 persen, lebih tinggi dari pada laki-laki yang hanya sebesar 25,13 persen. Lapangan usaha di sektor ini lebih banyak diminati oleh perempuan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Demikian pula di sektor perdagangan, persentase perempuan mencapai 33,92 persen dari laki-laki hanya sebesar 24,87 persen. Sektor ini banyak diminati oleh perempuan, karena dapat bekerja sambil mengurus rumah tangga (lihat tabel 12).

Tabel 12  
 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha di Kota Depok, Tahun 2005

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (%)
1	2	3	4
Pertanian	1.99	0.28	1.44
Pertamb.& Penggalian	0.67	0.28	0.55
Industri	14.27	16.96	15.14
Listrik, Gas & Air	1.08	0.28	0.82
Konstruksi	8.57	1.70	6.35
Perdagangan	24.87	33.92	27.79
Angkutan & Komunikasi	11.82	1.98	8.63
Keuangan	11.47	7.07	10.05
Jasa-jasa	25.13	37.53	29.14
Lain-lain	0.13	-	0.09
JUMLAH	100.00	100.00	100.00

Sumber : Kota Depok Dalam Angka 2006

Selanjutnya jika dilihat dari jenis pekerjaan pada pekerjaan utama penduduk Kota Depok, maka nampak bahwa mayoritas penduduk di Kota Depok pada tahun 2005 bekerja pada jenis pekerjaan tenaga produksi sebesar 29,91 persen, kemudian pada jenis pekerjaan tenaga usaha penjualan sebesar 20,23 persen, pada jenis pekerjaan pejabat pelaksana dan tenaga usaha sebesar 19,65 persen, pada jenis pekerjaan tenaga usaha jasa sebesar 18,92 persen, dan sisanya tersebar di berbagai jenis pekerjaan seperti pada jenis pekerjaan tenaga profesional sebesar 5,72 persen, pada jenis pekerjaan tenaga usaha pertanian sebesar 2,49 persen, jenis pekerjaan tenaga kepemimpinan dan menejer hanya 2,35 persen, dan yang paling kecil persentasenya adalah yang berkerja pada jenis pekerjaan Anggota TNI dan lainnya yaitu hanya sebesar 0,73 persen (lihat tabel 13).



Tabel 13  
 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama Di Kota Depok, Tahun 2005

Lapangan Usaha	Laki-laki + Perempuan (%)
1	2
Tenaga Profesional	5.72
Tenaga Kepemimpinan dan Manager	2.35
Pejabat Pelaksana & Tenaga Tata Usaha	19.65
Tenaga Usaha Penjualan	20.23
Tenaga Usaha Jasa	18.92
Tenaga Usaha Pertanian	2.49
Tenaga Produksi	29.91
Anggota TNI dan Lainnya	0.73
JUMLAH	100.00

Sumber Kota Depok Dalam Angka 2006

Kota Depok memiliki keunggulan komparatif, terutama letaknya yang sangat strategis berada pada poros Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Karakteristik wilayah Depok termasuk kategori perkotaan, akan tetapi masih terdapat sebagian kecil wilayah bercirikan pedesaan, terutama berada pada wilayah-wilayah di bagian Selatan Depok.

Meskipun merupakan wilayah perkotaan, Depok dikenal memiliki potensi unggulan daerah berupa komoditas *Hortikultura* yang dikembangkan dengan konsep *Pertanian Perkotaan*, salah satunya adalah belimbing. Dalam setiap tahunnya produksi belimbing terus meningkat meskipun dihadapkan pada masalah terbatasnya kesediaan lahan. Tingginya produksi ini disebabkan oleh populasi tanaman yang terus bertambah dan produktivitas yang meningkat sebagai akibat introduksi ilmu pengetahuan dan teknologi budidaya. Minat berusaha tani belimbing meningkat dipicu oleh kuatnya daya serap pasar, harga yang relatif stabil dan margin laba yang cukup memadai. Kecocokan agroklimat dan tersedianya varietas unggul menjadikan belimbing Depok memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan belimbing dari daerah lain.

Pada tahun 2006, luas areal tanaman belimbing di Kota Depok mencapai 119,6 Hektar, dengan total produksi 3.208 ton. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, omzet produksi belimbing Kota Depok mencapai Rp.19 Milyar per tahun, meningkat sekitar 11,76% dari tahun 2005, yang hanya mencapai Rp. 17 Milyar.

Selanjutnya tanaman hias juga merupakan komoditas prospektif di Kota Depok, seiring dengan perkembangan Kota dan meningkatnya jumlah pemukiman

yang membutuhkan tanaman-tanaman *landscaping* dan tanaman hias pekarangan yang diminati warga perkotaan. Komoditas tanaman hias yang menjadi unggulan Kota Depok adalah tanaman anggrek.

Dari tahun ke tahun perkembangan produksi tanaman hias di Kota Depok maju pesat, dan tersebar di hampir seluruh kecamatan, dengan luas pengembangan tanaman hias pada tahun 2006 mencapai 25 hektar dengan omzet per tahun mencapai 14 milyar.

Selain komoditas hortikultura juga dikembangkan komoditas perikanan, yaitu ikan hias. Hingga akhir tahun 2006, produksi ikan hias di Kota Depok mencapai 58.719.390 ekor, dengan nilai Rp. 34.064.072.400, tersebar di 6 (enam) kecamatan di Kota Depok. Saat ini, pasar ikan hias (lokal, regional dan ekspor) cukup terbuka dan menjadikan usaha tani ikan hias berkembang dan diminati masyarakat.

#### **d. Bidang Pemerintahan Umum**

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan kapasitas yang memadai, baik dari sisi kapasitas aparatur, kemampuan keuangan daerah serta perbaikan mekanisme birokrasi untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. Untuk hal itu, program peningkatan kapasitas pemerintahan Kota mendapat perhatian khusus dalam Renstra Kota Depok. Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, sejumlah 910 aparatur kota telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di berbagai jenjang dan bidang yang diperlukan.

Di sisi Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan yang signifikan, pada tahun 2000 PAD Kota Depok sebesar Rp. 14,311 milyar, meningkat tajam pada tahun 2001 menjadi 44,787 milyar. Pada tahun 2002 dengan perubahan nomenklatur dan komponen PAD, sehingga jumlah nominal turun menjadi Rp. 34,501 milyar, dan kemudian naik lagi tahun 2003 sebesar Rp. 41,165 milyar, pada tahun 2004 Rp. 43,702 milyar, dan pada tahun 2005 sebesar Rp. 64,060 milyar. Meskipun peningkatan telah signifikan, tetapi dari struktur APBD porsi pembiayaan dari PAD masih berkisar 10%.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan kondisi PAD Kabupaten induk yang ditinggalkan, ternyata persentasenya masih sangat kecil. Kondisi PAD Kabupaten Bogor setelah ditinggalkan Kota Depok setelah berjalan beberapa

tahun, yaitu pada tahun 2003 sebesar Rp. 147.920.750,43; tahun 2004 sebesar Rp. 166.260.112,97; dan pada tahun 2005 sebesar Rp. 199.424.944.044 (Kabupaten Bogor Dalam Angka, 2006). Apabila PAD Kota Depok khususnya untuk tahun yang sama, 2003, 2004, dan 2005 dibandingkan dengan PAD Kabupaten Bogor tersebut, maka berturut-turut PAD Kota Depok baru mencapai 27,82%, 26,28 %, dan 32,55 % dari PAD Kabupaten Bogor.

Kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan juga semakin membaik dengan meningkatnya persentase tindak lanjut temuan dari 49,8% pada tahun 2002, menjadi 64,69% pada tahun 2003, dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 83,14 temuan telah ditindaklanjuti. Pada tahun 2005 pengawasan yang dilaksanakan terhadap 24 SKPD yang terdiri atas 13 Dinas, 5 Kantor, dan 6 Kecamatan, diperoleh 218 temuan beserta 218 penyebab dengan tindak lanjut rekomendasi 323 dari 380 rekomendasi. Dengan demikian, persentase capaian rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti mencapai 85%.

#### **e. Keamanan dan Kriminalitas**

Pada tahun 2005 di Kota Depok ditemukan sebanyak 2.209 tindak kejahatan dengan berbagai motif. Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang menduduki peringkat pertama adalah kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) sebanyak 944 kasus disusul kasus pencurian bermotor (Curanmor) sebanyak 595 kasus. Namun pada tahun 2006, tindak kejahatan dengan berbagai motif tersebut cenderung menurun karena sampai bulan september 2006 jumlahnya baru mencapai 1527 tindak kejahatan (Depok dalam Angka 2006).

Untuk lebih mewujudkan pemerintah Kota Depok yang lebih demokratis, pemerintah harus lebih terbuka untuk menerima masukan pendapat dari berbagai sumber. Salah satunya dari arus bawah (masyarakat) dalam bentuk unjuk rasa. Hal itu terlihat dari adanya kenaikan jumlah unjuk rasa dari tahun ke tahun; misalnya pada tahun 2005 jumlah unjuk rasa adalah 123 kali yaitu meningkat 63,4% dari tahun 2004 (78 kali). Sebagian besar unjuk rasa mengusung aspirasi masyarakat dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

Dalam hal keamanan, pasca-berpisah dari Kabupaten Bogor untuk menjadi daerah otonom baru hingga saat ini, Kota Depok dalam keadaan kondusif (tidak terjadi konflik). Hal ini terjadi karena kesatuan masyarakat hukum Depok

terbentuk dari struktur masyarakat perkotaan, yang di dalamnya terdapat banyak asosiasi-asosiasi kepentingan, antara lain diwakili oleh LSM dan organisasi masa/ormas-ormas (ormas mahasiswa/pemuda, ormas perburuhan, ormas politik) yang orang-orangnya relatif independen dan mempunyai toleransi yang tinggi dalam hidup bermasyarakat terutama dalam hal berbeda pendapat. Adapun jumlah LSM dan ormas di Kota Depok meningkat tajam, misalnya pada tahun 2005 berjumlah 17 buah pada tahun 2006 meningkat tajam menjadi 87 buah (Depok dalam Angka 2006).

Sebagai masyarakat perkotaan yang sedang tumbuh, masyarakat Depok mengekspresikan aspirasi dan perilakunya secara terlembaga. Lembaga formal maupun nonformal menjadi tempat penyalurannya. Dengan demikian, semua perbedaan kepentingan dan aspirasi dapat disalurkan pada saluran-saluran yang semestinya sehingga tidak menimbulkan ledakan-ledakan yang dahsyat yang merusak semua tatanan yang ada. Meskipun sejak pemilihan Wali Kota terjadi gejolak tapi dapat dilokalisir yang semakin hari kondisinya makin kondusif bagi pengembangan masyarakat madani dan pelaksanaan program pembangunan.

#### **f. Pengangguran dan Kemiskinan**

Berbagai upaya dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok semenjak menjadi daerah otonom untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Depok kurang berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari:

- (1) angka pengangguran tiga tahun terakhir yang cenderung meningkat; di mana pada tahun 2004 angka pengangguran sebesar 6,73%; pada tahun 2005 angka pengangguran meningkat menjadi 7,57%, dan pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 8,48%.
- (2) Jumlah keluarga miskin (pra sejahtera) tiga tahun terakhir berfluktuatif dan cenderung meningkat; di mana pada tahun 2004 jumlah keluarga miskin sebanyak 6.942 (2,9%); pada tahun 2005 jumlah keluarga miskin menurun menjadi 5.931 (1,61%), dan pada tahun 2006 jumlah keluarga miskin meningkat kembali menjadi sebanyak 7.684/2,51% (Depok dalam angka, 2004-2006).

#### **D. RENCANA PEMEKARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

Apabila deskripsi pemekaran 2 daerah sebelumnya (Banten dan Depok) merupakan daerah yang telah berhasil mekar dan menjadi daerah otonom baru, maka untuk kasus Kabupaten Tangerang masih merupakan proses menuju terbentuknya daerah otonom baru, yaitu Kota Tangerang Selatan yang memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang sebagai induknya.

Rencananya wilayah Kota Tangerang Selatan yang diusulkan mencakup 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ciputat (34,96 km<sup>2</sup>), Kecamatan Pamulang (27,66 km<sup>2</sup>), Kecamatan Serpong (43,72 km<sup>2</sup>), Kecamatan Pondok Aren (28,83 km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Cisauk (43,38 km<sup>2</sup>); atau 7 kecamatan, dengan tambahan 2 kecamatan lagi yaitu kecamatan Ciputat Timur yang merupakan pemekaran wilayah kecamatan Ciputat dan kecamatan Serpong Utara yang merupakan pemekaran dari kecamatan Serpong.

##### **1. Alasan Pemekaran**

Pemikiran rencana dan upaya pemekaran daerah kota Tangerang Selatan dapat dikatakan merupakan gabungan dari adanya kebutuhan untuk mempercepat proses pertumbuhan daerah tersebut, dan adanya tuntutan berbagai kelompok masyarakat termasuk kelompok elite politik yang berharap mendapatkan manfaat dari terjadinya pemekaran daerah Tangerang Selatan. Pemekaran selayaknya akan mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga, melalui program-program :

- Peningkatan penyerapan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat
- Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
- Peningkatan optimalisasi pengelolaan potensi dan pertumbuhan perekonomian daerah.
- Percepatan pembangunan prasarana, sarana dan infrastruktur.
- Peningkatan kehidupan demokrasi.
- Peningkatan ketertiban dan keamanan.
- Peningkatan kualitas hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Beberapa alasan utama yang mendorong masyarakat di kecamatan-kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah kota Tangerang Selatan (kecamatan Pondok Aren, kecamatan Ciputat, kecamatan Pamulang, kecamatan Cisauk dan kecamatan Serpong) menuntut adanya pemekaran Kabupaten Tangerang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 14  
Alasan Utama Diperlukannya Pemekaran Kabupaten Tangerang

Alasan utama diperlukannya pemekaran Kabupaten Tangerang	Urutan
Letak/lokasi kantor pemerintah kabupaten sebagai pusat pelayanan masyarakat yang terlalu jauh	1
Ketersediaan sarana dan prasarana umum yang dirasakan masih kurang	2
Kepedulian aparat/pegawai pemerintah yang dirasakan masih kurang	3
Adanya kesenjangan ekonomi yang dirasakan kurang adil	4
Karakteristik budaya antarmasyarakat yang berbeda dan dapat mengganggu keaslian budaya lokal	5
Adanya ketimpangan dalam pembangunan	6

Sumber: hasil penelitian Pemkab Tangerang dan FISIP Universitas Langlang Buana (UNLA), 2005

Berdasarkan tabel di atas, yang menjadi alasan utama masyarakat menuntut pemekaran Kabupaten Tangerang berdasarkan urutan, yaitu *pertama*, letak/lokasi kantor pemerintah kabupaten (Tigaraksa) sebagai pusat pelayanan masyarakat yang terlalu jauh untuk diakses, yaitu rata-rata berjarak kurang-lebih 52 km dari wilayah kecamatan calon Kota Tangerang Selatan (Ciputat: 59 km, Ciputat Timur: 65 km, Pamulang: 54 km, Pondok Aren: 48 km, Serpong: 55 km, Serpong Utara: 50 km, Setu: 42 km, dan Cisauk: 40 km). Sebagaimana dirasakan masyarakat calon Kota Tangerang Selatan saat ini, pusat pemerintahan dan pelayanan Kabupaten Tangerang yang berada di Tigaraksa tersebut dianggap kurang efektif dan terlalu jauh untuk diakses. Dampak ikutannya adalah banyak hal yang tidak tertangani dengan baik, misalnya adalah terbengkalainya penataan dan pengelolaan lingkungan serta perkotaan di wilayah Tangerang Selatan. Lalu lintas yang semrawut, kemacetan lalu lintas yang semakin parah, lambatnya perbaikan jalan-jalan yang rusak, tumpang tindihnya pemanfaatan lahan, makin bertambahnya bangunan liar tanpa IMB dan sulitnya mengakses pelayanan mengakibatkan banyak masyarakat yang enggan memutasikan identitas kependudukan dan surat kendaraan bermotornya (terutama dari wilayah DKI

Jakarta) ke wilayah hukum Kabupaten Tangerang, adalah contoh lain dari kurang efektifnya pusat pemerintahan di Tigaraksa saat ini.

*Kedua*, ketersediaan sarana dan prasarana umum yang dirasakan masih kurang. Mayoritas responden (80%) memberikan penilaian yang rendah terhadap jumlah dan kualitas sarana dan prasarana umum, misalnya sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana dan prasarana fasilitas umum yang ada di Kabupaten Tangerang. Di samping itu, lambatnya pembangunan prasarana, sarana dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat juga mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat calon Kota Tangerang Selatan.

*Ketiga*, kepedulian aparat/pegawai pemerintah terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat (tingkat pengangguran dan kesejahteraan sosial) dirasakan masih kurang.

*Keempat*, adanya kesenjangan ekonomi yang dirasakan kurang adil. Masyarakat khususnya yang ada di kecamatan-kecamatan calon Kota Tangerang Selatan sebagian besar merasa bahwa wilayah mereka memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD maupun APBD Kabupaten Tangerang, namun dana alokasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka yang diberikan oleh Pemkab kurang adil.

*Kelima*, karakteristik budaya antarmasyarakat yang berbeda dan dapat mengganggu keaslian budaya lokal. Masyarakat yang berada di Tangerang Selatan merupakan perpaduan yang sangat kontras antara penduduk asli yang terdiri dari etnis Betawi dan etnis Sunda, dengan para pendatang atau kaum urban yang multi etnis bahkan multi ras. Bahkan karena wilayah Tangerang Selatan sangat dekat bahkan sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, maka banyak pula kaum pendatang “kelas bawah” yang mencari nafkah di DKI Jakarta namun berbaur di perkampungan penduduk asli di wilayah Tangerang Selatan. Keberbauran budaya dan kesenjangan yang sangat kontras di wilayah dengan kepadatan penduduk sangat padat (sekitar 7.000

jiwa/km<sup>2</sup>), tentu dikhawatirkan dapat mengganggu keaslian budaya lokal atau problema sosial lainnya.

*Keenam*, adanya ketimpangan dalam pembangunan. Akibat dari pembagian dana alokasi yang “kurang adil” menurut sebagian besar masyarakat dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan.

Adapun alasan masyarakat setuju dengan adanya pemekaran Kabupaten Tangerang, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15  
Alasan Masyarakat Setuju Terhadap Pemekaran Kabupaten Tangerang

No	Alasan Masyarakat Setuju Terhadap Pemekaran Kabupaten Tangerang	Urutan
1.	Efektifitas & efisiensi pelayanan	1
2.	Secara geografis dan kepadatan penduduk sudah memenuhi syarat	2
3.	Mempermudah komunikasi antarlokasi	3
4.	Lebih mensejahterakan masyarakat, pengontrolan kinerja lebih mudah, penerapan pembangunan	4
5.	Mempermudah pengurusan surat-surat atau urusan pemerintahan	5

Sumber: Hasil penelitian tim peneliti FISIP UNLA, 2005

Dari tabel di atas, diperoleh informasi bahwa ada lima alasan masyarakat setuju dengan adanya pemekaran wilayah di kabupaten Tangerang. *Pertama*, menginginkan adanya efektifitas & efisiensi pelayanan dari aparat pemerintahan. Hal ini didukung oleh persepsi sebagian besar masyarakat, yaitu 63,3% (570 dari 900 responden) menilai kondisi pemerintah Kabupaten Tangerang yang sekarang dirasakan kurang mampu, hanya 33,33% (300) yang menilai mampu dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga Kabupaten Tangerang perlu dilakukan pemekaran (Hasil penelitian tim peneliti FISIP UNLA, 2005).

*Kedua*, secara geografis dan kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan. Secara geografis Kabupaten Tangerang menempatkan beberapa kecamatan calon Kota Tangerang Selatan, seperti kecamatan Pondok Aren, kecamatan Ciputat, kecamatan Pamulang, kecamatan Cisauk dan kecamatan Serpong berbatasan langsung atau sangat dekat



dengan wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara. Letak geografis yang demikian, mengakibatkan berbagai kondisi perekonomian, sosial serta budaya di kecamatan-kecamatan di atas (yang juga berperan sebagai daerah penyangga Ibu Kota), memiliki permasalahan, kebutuhan dan tuntutan yang berbeda dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Tangerang. Permasalahan, kebutuhan dan tuntutan yang berbeda tersebut tentu saja membutuhkan antisipasi dan penanganan yang berbeda pula.

Saat ini total luas Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 26 kecamatan, 77 kelurahan dan 251 desa adalah 1.110,38 km<sup>2</sup> dianggap terlalu luas oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Total jumlah populasi penduduk di Kabupaten Tangerang berdasarkan data BPS tahun 2005 adalah 3.317.331 jiwa yang tersebar di 26 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 27,9 % atau sejumlah 924.724 jiwa bermukim di Tangerang Selatan dengan penyebaran 270.513 jiwa di Kecamatan Ciputat, 232.612 jiwa di Kecamatan Pamulang, 195.814 jiwa di Kecamatan Serpong, 238.321 jiwa di Kecamatan Pondok Aren dan 87.464 jiwa di Kecamatan Cisauk. Adapun rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Tangerang Selatan jauh lebih padat dari rata-rata kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan lain di wilayah Kabupaten Tangerang.

Selain rata-rata kepadatan penduduk, hal lain yang juga membedakan kondisi di Tangerang Selatan dengan kondisi di wilayah Kabupaten Tangerang lainnya adalah karakteristik penduduknya. Karena berbatasan langsung dan dekat dengan wilayah DKI Jakarta, maka suka atau tidak suka wilayah Tangerang Selatan menjadi daerah penyangga dan rembesan penduduk. Hal ini menyebabkan di wilayah Tangerang Selatan berkembang sentra-sentra perumahan modern berikut berbagai fasilitas perkotaan lainnya. Pertumbuhan masyarakat urban yang mayoritas adalah pendatang ini berlangsung di tengah kantung-kantung masyarakat tradisional pedesaan yang sebagian besar adalah penduduk asli. Tipikal penduduk pribumi yang relatif masih kental dengan budaya aslinya, sangat jauh berbeda dengan tipikal pendatang yang rata-rata berpendidikan dan

berstatus sosial-ekonomi lebih baik serta bergaya hidup lebih modern. Pergesekan sebagai akibat dari perbedaan pola pikir dan kepentingan sangat rawan untuk terjadi.

Tingkat kepadatan penduduk Tangerang Selatan yang jauh di atas rata-rata kepadatan penduduk wilayah Kabupaten Tangerang lainnya dan kondisi karakteristik penduduk urban-modern vs pedesaan-tradisional yang sangat kontras di Tangerang Selatan tentu membutuhkan manajemen pemerintahan yang lebih fokus dan profesional untuk tetap mendorong kemajuan yang telah tumbuh, tapi juga sekaligus mempersempit kesenjangan yang dialami kelompok-kelompok masyarakat yang masih tertinggal.

*Ketiga*, masyarakat berharap dengan adanya pemekaran Kabupaten Tangerang akan mempermudah komunikasi antarlokasi kecamatan-kecamatan yang tergabung dalam calon daerah otonom baru karena pusat pemerintahannya cukup dekat dan mudah diakses yaitu hanya rata-rata 5 – 10 Km.

*Keempat*, masyarakat setuju pemekaran karena daerah otonom baru diharapkan dapat lebih mensejahterakan masyarakat, pengontrolan kinerja lebih mudah, penerapan pembangunan lebih tepat sasaran. Dengan adanya pemekaran Kabupaten Tangerang atau terbentuknya kota otonom baru, manfaat yang diharapkan masyarakat antara lain: pelayanan masyarakat menjadi dekat dan murah, tersedianya berbagai fasilitas umum, tersedianya lapangan kerja baru, dan tersedianya sarana pendidikan yang memadai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat (Hasil penelitian tim peneliti FISIP UNLA, 2005). Manfaat lain yang diharapkan dengan adanya pemekaran Kabupaten Tangerang, yaitu wilayah kerja kabupaten induk dan daerah otonom baru menjadi tidak terlalu luas sehingga memudahkan dalam pengontrolan kinerja Pemda dan penerapan pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

*Kelima*, masyarakat setuju pemekaran karena daerah otonom baru diharapkan dapat mempermudah pengurusan surat-surat atau urusan pemerintahan. Masyarakat beranggapan dengan dekatnya pusat pemerintahan dan tidak terlalu luasnya wilayah kerja suatu Pemda akan memudahkan

masyarakat dalam pengurusan surat-surat dan memudahkan Pemda tersebut dalam menangani urusan pemerintahan.

Di samping alasan utama dan alasan persetujuan masyarakat di atas, ada alasan lain yang mendukung perlunya pemekaran Kabupaten Tangerang, yaitu dari aspek SDM dan aspek politik.

Dari aspek SDM, wilayah Tangerang Selatan tentu tidak diragukan bahkan dianggap memiliki cukup banyak SDM yang unggul dan kompetitif. Jumlah para profesional, lulusan perguruan tinggi, mahasiswa, aktifis LSM, ilmuwan dan tokoh-tokoh agama cukup banyak yang tinggal di wilayah ini. Di Tangerang Selatan juga cukup banyak perguruan tinggi ternama seperti UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Terbuka, Universitas Pamulang, STAN, UMJ, STIE Achmad Dahlan, Institut Teknologi Indonesia, STIKES, Akademi Pariwisata Sahid, dan sebagainya. Belum lagi hadirnya sekolah-sekolah unggulan tingkat SD sampai SLTA, seperti Al-Azhar, Kharisma Bangsa, Insan Cendekia, Global Jaya, Cikal Harapan, Stella Maris, Santa Ursula, Ora Et Labora, Madrasah Pembangunan UIN, MIN Percontohan, dan sebagainya. Jika kelak calon Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat mengoptimalkan potensi SDM yang tersedia maka Tangerang Selatan bahkan dapat dikembangkan menjadi sebuah kota metropolitan baru berdampingan dengan DKI Jakarta. Namun demikian tentu keseimbangan pembangunan harus tetap dijaga. Artinya, program-program pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan program-program pembangunan yang berorientasi pada pendistribusian ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat miskin dan penduduk asli.

Dari aspek politik, Tangerang Selatan dengan potensi SDM yang kompetitif tentu dapat dijadikan sumber perekrutan bagi partai politik. Data hasil pemilihan umum tahun 2004 lalu menunjukkan bahwa penduduk di wilayah Tangerang Selatan merupakan masyarakat yang "melek politik". Hal ini terbukti dari hampir 1 juta jiwa penduduk Tangerang Selatan pada pemilihan umum tahun 2004 yang lalu lebih dari 500.000 penduduk tersalurkan sebagai suara yang sah dan menghasilkan 15 anggota DPRD Kab. Tangerang. Potensi yang cukup besar

dalam aspek politik juga terlihat dari kenyataan lain bahwa selain 15 anggota DPRD Kabupaten di atas, masyarakat Tangerang Selatan juga menempatkan 11 orang politisinya di DPRD Provinsi Banten dan 8 orang di DPR RI. Selain itu pemekaran kota Tangerang Selatan juga akan memberi kesempatan yang lebih luas bagi para politisi partai untuk duduk dan berjuang bagi kepentingan partainya serta masyarakat di DPRD Kota Tangerang. Bagi para birokrat terutama para pegawai Pemda Kabupaten Tangerang, terbentuknya Kota Tangerang Selatan tentu akan memperluas kesempatan karir mereka.

## **2. Proses ke Arah Usul Pemekaran**

Penjelasan tentang proses pemekaran wilayah Kabupaten Tangerang menjadi kabupaten induk dan kota Tangerang Selatan akan dikaitkan dengan peraturan yang menaunginya, yaitu UU No. 32 Tahun 2004. Dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemekaran wilayah sebagai proses penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih untuk kemudian membentuk pemerintahan sendiri harus memenuhi persyaratan teknis, persyaratan fisik kewilayahan dan persyaratan administratif. Berikut akan dijelaskan proses pemekaran wilayah berdasarkan ketiga persyaratan tersebut.

Proses pemekaran wilayah Kota Tangerang Selatan telah memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan tersebut dilihat dari faktor-faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah (Sadu Wasistiono dkk, 2007). Dilihat dari aspek potensi ekonomi, kota Tangerang Selatan yang terdiri dari kecamatan memiliki potensi perekonomian yang sangat menjanjikan. Pada daerah ini banyak terdapat potensi sumber pendapatan daerah dari berbagai sektor ekonomi yang tumbuh secara cepat, seperti pusat-pusat bisnis, pusat hiburan, pusat industri, pemukiman dan lain-lain. Sebagai gambaran riil, perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak

daerah, redistribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berikut dengan hasil pengelolaannya serta lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah dan murni menjadi hak daerah yang didapat kota Tangerang Selatan yang didasarkan pada asas penduduk dan kondisi realistis mencapai Rp. 29.647.662.983 atau 16,42% dari total pendapatan Kabupaten Tangerang tahun 2002. Pada tahun 2003 PAD yang diterima Rp. 42.801.630.762 atau 17,83 persen. Tahun 2004, penerimaan PAD meningkat lagi yaitu mencapai Rp. 58.094.894.137 atau setara dengan 19,80%. Jumlah PAD tersebut merupakan modal yang besar untuk dapat membangun kota baru.

Dilihat dari faktor potensi daerah, calon Kota Tangerang Selatan mempunyai potensi yang besar untuk berkembang menjadi kota baru untuk menyangga dan mendampingi kota metropolitan Jakarta. Jika melihat perkembangan di Serpong, Pamulang, Ciputat dan Pondok Aren yang banyak tumbuh pusat-pusat pembelanjaan seperti Mal Ambassador, Mal WTC Matahari, Serpong Plaza, BSD Plaza, ITC BSD, Makro, Giant, Bintaro plaza, Ramayana dan Pertokoan Ciputat, niscaya kota Tangerang Selatan juga dapat menjadi kota metropolitan baru.

Jumlah penduduk di wilayah ini lebih dari satu juta jiwa. Menurut data BPS tahun 2005, Kecamatan Pamulang dihuni 232.612 jiwa, Ciputat dihuni 270.513 jiwa, Kecamatan Serpong 195.814 jiwa, Pondok Aren 238.321 jiwa dan Cisauk 87.464 jiwa. Penduduk yang berjumlah lebih dari satu juta jiwa tersebut memenuhi syarat untuk suatu daerah otonom. Selain itu jika dilihat aspek kependudukan, wilayah Tangerang Selatan memiliki cukup banyak SDM yang unggul dan kompetitif. Jumlah para profesional, lulusan perguruan tinggi, mahasiswa, aktifis LSM, ilmuwan dan tokoh-tokoh agama cukup banyak yang tinggal di wilayah ini. Di Tangerang Selatan juga cukup banyak perguruan tinggi ternama seperti UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Terbuka, Universitas Pamulang, STAN, UMJ, STIE Achmad Dahlan, Institut Teknologi Indonesia, STIKES, Akademi Pariwisata Sahid, dan sebagainya. Belum lagi hadirnya sekolah-sekolah unggulan tingkat SD sampai SLTA, seperti Al-Azhar, Kharisma

Bangsa, Insan Cendekia, Global Jaya, Cikal Harapan, Stella Maris, Santa Ursula, Ora Et Labora, Madrasah Pembangunan UIN, dan MIN Percontohan.

Dilihat dari segi perundang-undangan, pembentukan kota baru dan daerah otonom lainnya diatur dalam PP No. 129 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa persyaratan fisik pembentukan kabupaten minimal terdiri dari 5 kecamatan dan pembentukan kota minimal 4 kecamatan. Mengacu pada syarat tersebut, wilayah Tangerang Selatan seperti yang diusulkan telah memenuhi persyaratan fisik di atas. Untuk selanjutnya Panitia Khusus Pemekaran Wilayah Kabupaten Tangerang yang dibentuk pada tahun 2003 membentuk Presidium Pemekaran Wilayah. Anggota presidium ini bertugas menetapkan batas wilayah, lokasi pemerintahan, dan bentuk pemerintahan atas dua kota baru tersebut. Anggota presidium tersebut terdiri dari tujuh orang yang berasal dari para penggiat pembentukan kota baru, DPRD, dan eksekutif.

Proses pemekaran wilayah yang dilakukan sebagai persyaratan administrasi dimulai dari gagasan untuk membentuk kota Tangerang Selatan sebagai pemekaran dari wilayah Kabupaten Tangerang. Aspirasi ini mulai digulirkan sekitar 12 tahun yang lalu, dalam bentuknya yang lain. Namun upaya yang lebih serius dimulai setelah era otonomi di jaman Reformasi, yaitu pada saat diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 dan menemui momentum besarnya setelah disahkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2000, beberapa tokoh dari kecamatan-kecamatan mulai menyebut-nyebut Cipasera, yaitu akronim dari Ciputat, Cisauk, Pamulang, Pagedangan, Serpong dan Pondok Aren sebagai wilayah otonom. Selain usulan nama Kota Cipasera nama-nama lain yang kemudian muncul adalah Kota Tangerang Selatan, Kota Serpong Raya dan Kota Ciputat Raya (Nama terakhir yang kemudian digunakan adalah Kota Tangerang Selatan). Sementara wilayah cakupannya ada beberapa usulan, dari mulai hanya 5 kecamatan (Ciputat, Pamulang, Serpong, Pondok Aren dan Cisauk), 6 kecamatan (5 kecamatan yang sudah disebutkan ditambah kecamatan Pagedangan, 7 kecamatan (5 kecamatan di

atas ditambah Ciputat Timur yang merupakan pemekaran wilayah kecamatan Ciputat dan Serpong Utara yang merupakan kecamatan Serpong, sampai dengan 8 kecamatan (7 kecamatan ditambah dengan kecamatan Setu).

Aspirasi masyarakat Tangerang Selatan dari berbagai komponen masyarakat yang meliputi tokoh-tokoh masyarakat, kalangan ulama, anggota legislatif, LSM, Badan Perwakilan Desa, Kepala Desa, tokoh-tokoh pemuda, ormas, organisasi sosial politik, kalangan pengusaha, tokoh pers, mahasiswa, kaum intelektual dan lain-lain melakukan serangkaian musyawarah dan berhasil membentuk Badan Koordinasi Pembentukan Kota Cipasera. Pada tahun 2001 berkas permohonan pembentukan Kota Cipasera disampaikan ke DPRD Kabupaten Tangerang. Namun, karena adanya pasang surut organisasi penggagas kota otonom tersebut dan terpotong dengan kegiatan Pemilu pada tahun 2004, maka konsep pembentukan kota Cipasera tersebut mulai muncul kembali pada tahun 2004.

Melalui forum besar bernama Musyawarah Masyarakat Cipasera yang berlangsung di SMA PGRI Serpong pada tanggal 28 November 2004 ditetapkan organisasi Badan Koordinasi Pembentukan Kota Cipasera atau Bakor Cipasera sebagai payung dari berbagai institusi dan individu dalam rangka memperjuangkan aspirasi pembentukan pemerintahan kota. Musyawarah tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh Tangerang Selatan dari berbagai unsur, yaitu DPR RI, DPRD Provinsi Banten, DPRD Kabupaten Tangerang, Komite Cipasera, Ulama, Pemuda, Ormas, LSM, Mahasiswa, Forum Rektor, Forum Kades, Badan Perwakilan Daerah, Tokoh Lintas Kecamatan dari Ciputat, Pamulang, Serpong, Pondok Aren, Pegedangan dan Cisauk. Hadir pula sejumlah undangan peninjau dari Badan Perwakilan Daerah (BPD) Banten, budayawan dan beberapa tokoh nasional.

Bahkan sebelum Musyawarah Masyarakat Cipasera di atas yang akhirnya melahirkan "Bakor", sejumlah komponen dan warga masyarakat yang tinggal di kawasan Tangerang Selatan telah mengadakan sejumlah pertemuan. Antara lain, pertemuan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2004 yang berlangsung di Balai

Sidang Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) Serpong. Pertemuan tersebut menghadirkan para pihak terkait dalam potensi pemekaran wilayah kabupaten Tangerang untuk berdialog “satu meja”, antara lain para pejabat Pemda Kabupaten Tangerang, DPRD Kabupaten Tangerang, DPRD Provinsi Banten, DPR RI, anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) serta para aktifis dan pengurus Komite Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Kota Cipasera/Tangerang Selatan.

Hasil pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk segera merealisasikan terbentuknya kota otonom Tangerang Selatan hasil pemekaran dari kabupaten Tangerang. Pertemuan berikutnya untuk lebih mempertegas keinginan masyarakat untuk membentuk kota baru dilakukan di *German Centre* – Bumi Serpong Damai pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2004. Peserta pertemuan lebih luas lagi karena selain peserta pertemuan terdahulu, juga hadir para pengusaha, insan pers dan Bupati Tangerang yang diwakili oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Bapak Benyamin Dafni. Forum ini menunjuk formatur yang tugasnya adalah membuat konsep organisasi atau institusi apa yang dianggap mampu menjadi representasi aspirasi masyarakat Tangerang Selatan sekaligus mampu membawa amanat masyarakat dalam rangka pembentukan Kota Tangerang Selatan. Formatur terdiri dari 9 orang, yaitu 6 orang dari unsur kecamatan (Ciputat, Cisauk, Pamulang, Serpong, Pondok Aren dan Setu), 1 orang dari unsur Komite Tangerang Selatan, 1 orang dari unsur pengusaha dan 1 orang dari unsur pers. Pada tahun 2005 Bupati Kabupaten Tangerang merespon dan mulai menyiapkan kajian menyeluruh (kajian strategis) yang dilakukan oleh Program Pascasarjana IPDN Bandung yang diketuai oleh Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS

Pada tanggal 27 Desember 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang menyetujui terbentuknya Kota Tangerang Selatan. Calon kota otonom ini terdiri atas tujuh kecamatan, yakni, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Setu dan 6 desa di Kecamatan Cisauk, yang nantinya dimasukkan ke dalam wilayah kecamatan Setu. Dengan demikian total desa/kelurahan yang masuk wilayah kota Tangerang Selatan 54 desa/kelurahan.



Wilayah ini berpenduduk sekitar 966.037 jiwa, dengan luas wilayah 152.216 km<sup>2</sup>. Batas wilayah adalah sungai Cisadane sehingga wilayah kecamatan Cisauk dibagi 2 antara kota dan kabupaten. Enam desa termasuk wilayah kota akan digabung dengan kecamatan Setu.

Pada tanggal 22 Januari 2007, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang menetapkan Kecamatan Ciputat sebagai pusat pemerintahan Tangerang Selatan. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Endang Sujana, Ciputat dipilih secara aklamasi. Sebelumnya, beberapa pihak, termasuk Bupati Tangerang Ismet Iskandar menyebut dua kecamatan, yakni Ciputat dan Serpong sebagai calon pusat pemerintahan Tangerang Selatan. Di Serpong, lokasinya di bekas Kantor Wedana Serpong seluas 4 hektar yang kini digunakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Adapun di Ciputat lokasinya di Kantor Kecamatan Ciputat seluas 2 hektar.

Pelaksana tugas Ketua Panitia Khusus Kajian Rencana Pemekaran Wilayah, R Dahyat Tenggara, menyatakan bahwa daerah Ciputat memiliki nilai strategis dan memenuhi syarat menjadi ibukota. Presidium Pembentukan Tangerang Selatan dan pemerintah induk Kabupaten Tangerang sudah sepakat dengan keputusan ini. Lokasi persis ibukota itu adalah Kelurahan Maruga yang merupakan bekas Kantor Kawedanan Ciputat dan dipakai sebagai kantor Kecamatan Ciputat. Pada rapat paripurna lanjutan, seluruh fraksi DPRD juga menyetujui pemekaran tiga kecamatan baru di wilayah Tangerang bagian selatan. Kecamatan baru itu adalah Kecamatan Ciputat Timur (pemekaran dari Kecamatan Ciputat), Kecamatan Setu (pemekaran dari Kecamatan Cisauk), dan Kecamatan Serpong Utara (pemekaran dari Kecamatan Serpong). Sedang Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Pamulang tidak ada pemekaran wilayah. Dengan demikian, jumlah kecamatan di Kota Tangerang Selatan bertambah dari lima menjadi delapan kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Keputusan Bupati Tangerang No. 130/kep.149.huk/2007 tentang persetujuan Pembentukan Kota Tangerang Selatan, menyetujui: a) pemberian bantuan dana/Bantuan Hibah selama 2 (dua)

tahun sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) pertahun untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kota dan bantuan biaya pemilihan kepala daerah pertama sebesar 648.867 pemilih X Rp. 15. 000,- per pemilih = Rp. 9.733.035.000,- (Sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ribu rupiah), indek biaya per pemilih tahun 2007, b) pelepasan aset yang berupa aset bergerak, tidak bergerak, personil, dan hutang piutang.

Pada tanggal 16 Maret 2007 Bupati Tangerang Ismet Iskandar menyerahkan berkas pembentukan Kota Tangerang Selatan kepada pemerintah Provinsi Banten. Kota baru Tangerang Selatan ditargetkan dapat terbentuk pada tahun 2008.

Pada tanggal 23 Maret 2007 Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten mulai membahas berkas usulan pembentukan Kota Tangerang. Pembahasan dilakukan setelah berkas usulan dan persyaratan pembentukan Kota diserahkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ke DPRD Banten hari Kamis, tanggal 22 Maret 2007.

Saat ini, berdasarkan surat Gubernur Banten No. 135/1436-pem/2007, tanggal 25 Mei 2007 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan, berkas pembentukan kota baru Tangerang Selatan telah diserahkan ke Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Mei 2007 untuk kemudian dikaji oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Mengacu pada apa yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemekaran wilayah atau daerah, baik bagi daerah yang telah berhasil dimekarkan maupun yang sedang mengusulkan pemekaran dipicu adanya acuan normatif, di mana regulasi pemerintah memberikan peluang untuk pemekaran melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Acuan normatif mendorong elite daerah memekarkan daerahnya dengan alasan demi mempercepat pembangunan, mempermudah pelayanan publik, dan mengakselerasi produktivitas potensi daerah. Akan tetapi, di samping alasan ideal tersebut secara riil juga terdapat alasan pragmatik khususnya bagi para elite daerah. Alasan pragmatik tersebut adalah adanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan materiil dan immateriil seperti adanya jabatan-jabatan baru di lingkungan eksekutif dan legislatif, proyek-proyek baru sebagai akibat pembangunan gedung-gedung/perkantoran/infrastruktur baru, dan pengelolaan dana yang relatif otonom dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah otonom melalui dana perimbangan (dana bagi hasil dan DAU).
2. Pemekaran daerah untuk kasus Provinsi Banten yang memisahkan diri dari induknya, Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok yang memisahkan diri dari induknya Kabupaten Bogor, menunjukkan kinerja yang relatif baik, yaitu cenderung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang mendukung sehingga kedua daerah pemekaran tersebut cenderung berhasil adalah: 1) adanya kesiapan lembaga dan 2) adanya kesiapan masyarakatnya. Banten dan Depok sebelum menjadi daerah otonom, adalah dua wilayah pelayanan pejabat Pembantu Gubernur dan Walikota Administratif. Dengan demikian, dua daerah calon daerah otonom telah terbentuk kelembagaannya. Di samping itu, baik Banten maupun Depok mempunyai struktur masyarakat yang mendukung untuk menjadi kesatuan masyarakat hukum baru.

Masyarakat Banten yang relatif homogen dan masyarakat perkotaan Depok yang relatif tumbuh sebagai masyarakat madani, *civil society*, sangat kondusif bagi terbentuknya kesatuan masyarakat hukum yang mampu mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasinya.

3. Secara teknis proses pemekaran wilayah dilakukan melalui dua prosedur, yaitu prosedur transisi teknokratis (*top down*) dan prosedur demokratik (*bottom up*). Prosedur transisi teknokratis yang sering juga disebut prosedur elitis dan sentralistis diterapkan pada masa orde baru, di mana sebelum suatu wilayah Administratif dimekarkan menjadi daerah otonom baru terlebih dulu dipersiapkan administrasi dan birokrasinya, misalnya sebelum menjadi Kotamadya dipersiapkan menjadi Kota Administratif terlebih dahulu. Kabupaten diberikan ruang untuk mempersiapkan kabupaten baru melalui pembentukan kawedanan dan provinsi membentuk karesidenan untuk calon provinsi baru. Pembentukan daerah otonom baru Provinsi Banten dan Kota Depok menggunakan prosedur transisi teknokratis (*top down*). Prosedur demokratik membuka peluang terbentuknya suatu daerah baru berdasarkan tuntutan masyarakat setempat, sehingga partisipatif berlangsung dari bawah. Usulan pembentukan Kota Tangerang Selatan yang saat ini sedang diproses di Depdagri merupakan salah satu contoh pemekaran wilayah/daerah yang menggunakan prosedur demokratik (*bottom up*).
4. Dampak pemekaran wilayah sangat tergantung dari kesiapan daerah yang baru untuk menanggung semua beban administrasi dan birokrasi pemerintahan serta pengelolaan sumber-sumber yang dimilikinya. Daerah otonom baru yang telah siap dengan administrasi, birokrasi, dan infrastrukturnya maka akan lebih mudah mengelola potensi dan persoalan yang ada, sehingga mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Sedangkan daerah baru yang belum memiliki kesiapan administrasi, birokrasi, dan infrastruktur di daerahnya tidak akan mampu mengurus pemerintahan umum dan bahkan cenderung memproduksi permasalahan baru dalam bentuk konflik-konflik yang kontra produktif terhadap upaya menyejahterakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Provinsi Banten dan Kota Depok yang telah menunjukkan adanya *trend* peningkatan dari tahun ke tahun pada masing-masing sektor atau

bidang yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat setelah  $\pm$  7 tahun menjadi daerah otonom baru dan tidak terjadinya konflik antar masyarakat. Namun, tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih di bawah tingkat kesejahteraan masyarakat provinsi dan kabupaten induknya. Dengan demikian, tujuan dari pemekaran daerah yang diamanatkan dalam acuan normatif belum tercapai.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka dibutuhkan sebuah model pemekaran daerah yang secara normatif mampu memadukan antara kemauan elite dan tuntutan kebutuhan dari masyarakat. Model tersebut diharapkan memungkinkan masuknya aspek-aspek lain di luar acuan hukum formal, tetapi juga mengacu pada indikator-indikator substantif di bidang ekonomis dan sosio-kultural dalam rangka menyejahterakan masyarakat daerah secara menyeluruh.

Universitas Terbuka

## DAFTAR PUSTAKA

- Batinggi, Achmad, 1999, *Manajemen Pelayanan Umum*, Pusbit UT, Jakarta.
- Bryson, John M. 1991, *Strategis Planning for Public and Non Profit Organizations*, Jossey-Bass, San Fransico-Oxford.
- Chema G, Shabir, and Rondinelly, Dennis, ed, 1983, *Decentralization and Development, Policy Implementation in Development Countries*, Sage, London.
- Hoessein, Bhenyamin, 1993, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi*, Disertasi Pascasarjana UI, tidak diterbitkan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia: Akan Berputarkah Roda Desentralisasi dari Efisiensi ke Demokrasi?*, Pidato Pengukuhan Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Administrasi Negara FISIP-UI, November 1995, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Sentralisasi dan Desentralisasi: Masalah dan Prospek, Dalam Menelaah Format Politik Orde Baru*, PPW-LIPI – Yayasan Insan Politika – Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001a, *Transparansi Pemerintahan, dalam Jurnal Forum Inovasi*, November 2001.
- \_\_\_\_\_, 2001b, *Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Artikel.
- Koswara, E., 2001, *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Pariba, Jakarta.
- Mark Turner dan David Hulme, 1997, *Governance, Administration, and Development*, Kumarian, Connecticut USA.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri, 2004, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Parr, J.B, 1999, *Regional Economic Development: An Export Stages Frame Work*, Land Economic.
- Rahayu, Amy Y.S, 1977, *Fenomena Sektor Publik dan Era Service Quality*, dalam *Bisnis dan Birokrasi* No. 1/Vol.III/April/1977.
- Sadu Wasistiono dkk, 2007. *Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Tangerang Selatan*, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang: Binwil.

**Sumber Lain:**

- ANTARA Serang, 9 Januari 2005.
- Badan Pusat Statistik Kota Depok, Kota Depok dalam angka 2004-2006
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Jawa Barat Dalam Angka 2004 - 2006*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. *Banten Dalam Angka 2005-2006*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2005. *Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Bogor Tahun 2005*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, *Kabupaten Bogor Dalam Angka 2005-2006*
- Bappeda Kota Depok, 2006. *Lakip Kota Depok Tahun 2006*
- Bappeda Provinsi Banten, 2006. *Lakip Provinsi Banten Tahun 2006*
- Biro Pemerintahan Setda Prop. Banten, 2003. *Proceeding: Diskusi Panel Kajian Hari Jadi Provinsi Banten.*
- Pemkab Tangerang dan FISIP Universitas Langlang Buana (UNLA), 2005. *Studi Kelayakan Pembentukan Kota Otonom CIPASERA.*
- Surat Kabar Pikiran Rakyat Bandung, tanggal 20 Juli 2004.
- UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- PP 129/2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

### Jadwal Kegiatan Penelitian

waktu \ kegiatan	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov
<b>Persiapan:</b>									
Pengembangan instrumen									
<b>Pelaksanaan:</b>									
Pengumpulan data									
Pengolahan data									
Analisis data									
Penulisan laporan									
Seminar									
Revisi laporan									
Penggandaan laporan									

### RINCIAN BIAYA PENELITIAN

#### Tahun Pertama (2007)

##### A. Pelaksana

Gaji/Upah

1. Ketua Tim Peneliti (koordinator)  
1 orang X 10 bulan X 4 minggu X 12 jam X Rp. 10.000,- Rp. 4.800.000
  2. Anggota Tim Peneliti  
3 orang X 10 bulan X 4 minggu X 12 jam X Rp. 6.000,- Rp. 8.640.000
- Subtotal: 13.440.000,-**

##### B. Bahan Aus

1. ATK (disket, kertas HVS, blocknote dll.) Rp. 2.000.000
  2. Kaset tape, film, dll. Rp. 1.700.000
  3. Fotocopy dokumen tertulis/reference Rp. 1.000.000
- Subtotal: 4.700.000,-**

##### C. Perjalanan

1. Transportasi
    - Jakarta – Serang, PP (Propinsi Banten)  
3 orang X 5 perjalanan X Rp. 300.000,- Rp. 4.500.000
    - Transport lokal  
3 orang X 30 hari X Rp. 20.000,- Rp. 1.800.000
- Subtotal: 6.300.000,-**



**D. Laporan**

1. Pengolahan (transkripsi dan analisa) data	Rp. 2.500.000
2. Penulisan draft laporan dan perbaikannya	Rp. 1.500.000
3. Editing dan finalisasi laporan akhir	Rp. 500.000
4. Penggandaan laporan akhir, 25 exp, 100 hal.	Rp. 400.000

**Subtotal: 4.900.000,-****E. Lain-lain**

Asuransi, perijinan, administrasi, dll.	Rp. 660.000
---	-------------

**Jumlah Keseluruhan**

<b>A. Pelaksana</b>	<b>Rp. 13.440.000,-</b>
<b>B. Bahan Aus</b>	<b>Rp. 4.700.000,-</b>
<b>C. Perjalanan</b>	<b>Rp. 6.300.000,-</b>
<b>D. Laporan</b>	<b>Rp. 4.900.000,-</b>
<b>E. Lain-lain</b>	<b>Rp. 660.000,-</b>

---

**Rp. 30.000.000,-**

(Tiga Puluh Juta Rupiah).

Universitas Terbuka

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

**Ketua Peneliti:**

**a. Identitas**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap           | : Milwan, S.Sos, M.Si.  |
| 2. Tempat & Tanggal Lahir | : Metro, 12 Desember 1974   |
| 3. Status Perkawinan      | : Kawin   |
| 4. Agama                  | : Islam   |
| 5. Alamat Lengkap         | : Perumahan Taman Sari Bukit Damai<br>Blok A12/15 Jl. Anyelir Timur III<br>Pedurenan, Gn. Sindur, Bogor, Telp.<br>(0251) 601959 |

**b. Riwayat Pendidikan**

1. SDN I Tanjung Harapan Kec. Marga Tiga Lampung Timur, tamat tahun 1986.
2. SMP Utama Wacana I Metro Lampung Tengah, tamat tahun 1989
3. SMAN I Metro Lampung Tengah, tamat tahun 1992
4. S1 PS. Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, tamat tahun 1996
5. S2 PS. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada, tamat tahun 2001.

**c. Kursus Dan Penataran**

1. Kursus Komputer program Microsoft Office di Widyaloka tahun 1998.
2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III angkatan V dari tanggal 27 Nopember s.d. 14 Desember 1999.
3. Pelatihan Patut di UT tahun 1999
4. Pelatihan penulisan soal dan analisa item di UT tahun 2000
5. Pelatihan penulisan naskah Radio dan TV di UT tahun 2000.

**d. Riwayat Pekerjaan**

1. PT. Kenrose Indonesia (Perusahaan Parmasi) pada tahun 1996-1998
2. Universitas Saburai Bandar Lampung tahun 1998-2000
3. Universitas Terbuka pada tahun 1999 – Sekarang.

**e. Seminar yang Dihadiri**

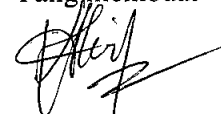
1. Sebagai Penyaji dalam kegiatan “Seminar II Dalam Rangka Menghadapi T.A. 1997/1998” di Universitas Saburai Bandar Lampung, tanggal 15 Nopember 1997.
2. Sebagai peserta pada seminar KRISIS NASIONAL DAN PERUBAHAN SOSIAL tanggal 29 Oktober 1998 di UGM Yogyakarta.
3. Sebagai peserta dalam Seminar Regional dan Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa DPW III POPMASEPI, pada tanggal 22-24 Februari 1999 di Yogyakarta.
4. Sebagai peserta Lokakarya Pengenalan Sistem Instruksional Dalam Sistem Belajar Jarak Jauh untuk Staf Akademik Baru Universitas Terbuka, pada tanggal 5 juli-8juli 1999.
5. Sebagai peserta dalam Seminar nasional “Peluang dan Tantangan Bidang Pendidikan, Politik, Ekonomi dan Teknologi Menghadapi Transformasi Demokrasi Pada Millenium ke III”, pada tanggal 19 Juli 1999 dalam rangka Wisuda Periode II UT tahun 1999.

6. Sebagai peserta dalam Seminar nasional “Peran Pendidikan Dalam Meningkatkan Kemampuan Dasar Siswa Sesuai Dengan Hak Azasi Anak, pada tanggal 2 juli 2001 di UT.

f. Karya Ilmiah

- 1 Hubungan Peranan Pemimpin Informal dan Partisipasi Politik Masyarakat Desa, Studi di Desa Sumberejo Talang Padang Lampung Tanggamus, tahun 1995.
- 2 Artikel IPTEK dengan Judul “Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah”, Komunika UT No. 24/tahun VII/2000.
- 3 Artikel IPTEK dengan Judul “Program Dana Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Alternatif Kebijakan Pengentasan Kemiskinan”, Komunika UT No. 25/tahun VII/2000.
- 4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sumatra Barat tahun 1999.
- 5 Studi Efektivitas Penilaian Kinerja PNS Kasus di Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, tahun 2001.
- 6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelambatan Kenaikan Jabatan Fungsional Tenaga Edukatif FISIP UT, tahun 2001, sebagai anggota peneliteti.
- 7 Strategi Peningkatan Kinerja Universitas Saburai Bandar Lampung, tahun 2001
- 8 Strategi Kepala UPBJJ UT Bogor Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Di Daerah Kerjanya, tahun 2002, sebagai ketua peneliteti.
- 9 Efektifitas Metode Pembelajaran Berbasis Media Audio Kaset Pada Mahasiswa UPBJJ-UT Bogor, tahun 2003, sebagai ketua peneliteti.
- 10 Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif Studi di Kabupaten Demak, tahun 2004, sebagai anggota peneliteti (Hibah Bersaing Dikti).
11. Evaluasi Diri Program Studi Ilmu Pemerintahan, tahun 2005, sebagai ketua Peneliteti
12. *Tracer Study* Program Studi Ilmu Pemerintahan, tahun 2005, sebagai ketua Peneliteti
13. Model Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Kabupaten (Tahun II), sebagai anggota, Ditjen Dikti Depdiknas, 2005.
14. Buku Panduan I Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Kabupaten, Ditjen Dikti Depdiknas, 2005
15. Buku Panduan II Jenis-Jenis Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Kabupaten, Ditjen Dikti Depdiknas, 2005
16. Buku Panduan III Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Kabupaten, Ditjen Dikti Depdiknas, 2005
17. Buku Panduan IV Monitoring Pelaksanaan Dan Evaluasi Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Pemerintah Kabupaten, Ditjen Dikti Depdiknas, 2005

Yang membuat



Milwan, S.Sos. M.Si

## Anggota Peneliti:

### Anggota I :

#### 1. Identitas Diri

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Chanif Nurcholis, M.Si
- b. Tempat dan tanggal lahir : Demak, 02 Februari 1959
- c. Pekerjaan : Dosen pada Jurusan Ilmu Administrasi  
FISIP Universitas Terbuka Jakarta.
- d. NIP : 132 002 051
- e. Pangkat : Penata (III/c)
- f. Jabatan : Lektor.

#### 2. Pendidikan

- a. 1990, Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Terbuka
- b. 2000, Pascasarjana (S2) Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- c. 2005, Studi Program Doktor (S3) Pascasarjana Ilmu Sosial UNPAD

#### 3. Pengalaman Bidang Penelitian

- a. 1992 – 1997 : Penelitei pada LP - Universitas Terbuka
- b. 1993 : Ketua Tim Penelitei LPM - UT
- c. 1998/1999 : Penelitei pada LP-UT - Ditjen Dikti Depdikbud.
- d. 2000 : Penelitei pada LP-UT - Ditjen Dikti
- e. 2000 : Penelitei pada SMERU-Bank Dunia.
- f. 2001 : Penelitei pada LP-UT - Ditjen Dikti Depdiknas.
- g. 2002 : Penelitei pada LP-UT – Ditjen Dikti Depdiknas
- h. 2004 : Penelitei pada LP-UT – Ditjen Dikti Depdiknas
- i. 2005 : Penelitei pada LP-UT – Ditjen Dikti Depdiknas

#### 4. Daftar Publikasi

##### a. Hasil Penelitian:

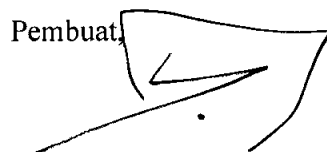
- 1) Hubungan Pendidikan Non Formal pada Pemuda Desa dan Partisipasi Mereka dalam Pembangunan Desa, FISIP-UT, 1992.
- 2) Profil Desa, Kasus di Desa Tajurhalang, Kec. Cijeruk, Kabupaten/ Dati II BogoR, FISIP-UT, 1993.
- 3) Dukungan Adminstrasi Desa terhadap Pelaksanaan IDT di Desa Tajurhalang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten/ Dati II Bogor, FISIP-UT, 1994.
- 4) Otonomi Desa dan Pelaksanaannya dalam Praktik Pemerintahan Desa, FISIP-UT, 1995.
- 5) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Dosen Perguruan Tinggi Negeri dalam Bidang Penelitian, Ditjen Dikti Depdikbud, 1998.
- 6) Model Penanggulangan Konflik Manifes, LP-UI - Ditjen Dikti Depdikbud, 1998.
- 7) Model Pelatihan Pimpinan Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Pedesaan (Tahun I), Ditjen Dikti Depdiknas, 1999.

- 8) Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Rumah Tangga Desa (Studi tentang Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Kabupaten Demak), Tesis Program Pascasarjana UI, 2000.
- 9) Model Pelatihan Pimpinan Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Pedesaan (Tahun II), Ditjen Dikti Depdiknas, 2001.
- 10) Persiapan Provinsi dan Kabupaten dalam Melaksanakan Otonomi Daerah (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus), SMERU Bank Dunia, 2001.
- 11) Buku Panduan Pengembangan Perencanaan Partisipatif Pemerintah Kabupaten (Tahun I), Ditjen Dikti Depdiknas, 2004
- 12) Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Kabupaten (Tahun I), Ditjen Dikti Depdiknas, 2004
- 13) Model Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Kabupaten (Tahun II), Ditjen Dikti Depdiknas, 2005
- 14) Buku Panduan I Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Kabupaten, Ditjen Dikti Depdiknas, 2005
- 15) Buku Panduan II Jenis-Jenis Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Kabupaten, Ditjen Dikti Depdiknas, 2005
- 16) Buku Panduan III Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Kabupaten, Ditjen Dikti Depdiknas, 2005
- 17) Buku Panduan IV Monitoring Pelaksanaan Dan Evaluasi Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Pemerintah Kabupaten, Ditjen Dikti Depdiknas, 2005

**b. Buku/ Modul:**

- 1) Administrasi Pemerintahan Desa, Panduan Kepala Desa dan Perangkat Desa, FISIP-UT, 1993.
- 2) Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah, Buku Materi Pokok Jurusan Administrasi FISIP-UT, Karunika, 2001.
- 3) Administrasi Pemerintahan Daerah, Buku Materi Pokok Jurusan Administrasi FISIP-UT, Pusbit UT, 2002
- 4) Administrasi Pemerintahan Desa, Buku Materi Pokok Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UT, Pusbit-UT, 2003
- 5) Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2005
- 6) Desentralisasi dan Otonomi Daerah di NKRI (editor), Pusbit UT, Jakarta, 2005

Pembuat,



Drs. Chanif Nurcholis, M.Si

Anggota 2 :

Nama : Drs. T I J A N, M.Si.  
 Tempat / Tgl. Lahir : Wonogiri, 20 November 1962  
 Pangkat / Golongan : Pembina / IV-a  
 Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
 Alamat : Perumh. Pondok Raden Patah Blok N-1/05  
 Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya:

## 1. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar Negeri 1 Sempukerep – Sidoharjo – Wonogiri Tahun 1975
- b. Sekolah Lanjutan Pertama Jatiroto – Wonogiri Tahun 1979
- c. Sekolah Pendidikan Guru Negeri 1 Semarang Tahun 1982
- d. Perguruan Tinggi:
  - Sarjana (S1) PMP dan KN - FKIS - IKIP Semarang Tahun 1986
  - Magister (S2) Ilmu Administrasi Negara - Universitas Brawijaya Malang

## 2. Riwayat Pekerjaan:

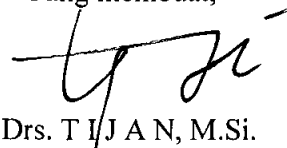
- a. Dari Tahun 1983 s/d Tahun 1987 Mengajar di SMP Empu Tantular Semarang
- b. Dari Tahun 1985 s/d Tahun 1987 Mengajar di SMEA Palebon Semarang
- c. Dari tahun 1987 s/d sekarang Mengajar di IKIP/UNNES Semarang

## 3. Pengalaman Penelitian (Sebagai Ketua Pelaksana)

- a. Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka Otonomi Lokal di Kecamatan Sayung
- b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Desa di Kabupaten Semarang
- c. Kebutuhan Strategis dan Potensi Sumber Daya Sosial Kabupaten Blora dalam pelaksanaan Otonomi Daerah
- d. Analisis Kebutuhan dalam rangka Pemberdayaan Badan Perwakilan Desa di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal
- e. Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Hutan Pasca Penjarahan di Kabupaten Blora

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Yang membuat,



Drs. T I J A N, M.Si.

Anggota 3:

<b>Identitas Diri</b>	
Nama (lengkap dengan gelar)	Dra. Ace Sriati Rachman, M.Si.
Alamat	Jl. Parkit Blok A5/14 Bukit Pamulang Indah V, Ciputat Tangerang 15417
Tempat/Tanggal Lahir	Bandung, 3 Mei 1962
Jenis kelamin	Perempuan
Status Perkawinan	Kawin
Jabatan struktural terakhir	Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka
Pekerjaan	Staf Akademik jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UT
Masa kerja di UT	12 tahun

<b>Riwayat Pendidikan</b>		
Jenjang Pendidikan	Tahun	Institusi
Sarjana Strata 2	2004	Universitas Indonesia
Sarjana Strata 1	1986	Universitas Padjadjaran

<b>Riwayat Pekerjaan</b>		
Jabatan	Tahun	Institusi/Instansi
Pegawai Swasta	1986 – 1992	-
Staf Pengajar	1992 – sekarang	Universitas Terbuka

<b>Riwayat Jabatan</b>	
Jabatan	Tahun
Ketua Program Studi D3 Komunikasi Penyuluhan, Unibersitas Terbuka	1995 – 1999
Ketua Program Studi D3 Komunikasi Penyuluhan, Universitas Terbuka	1999 – 2000 (Tugas Belajar S2)
Sekretaris Jurusan Ilmu Komunkasi Universitas Terbuka	2005- sekarang

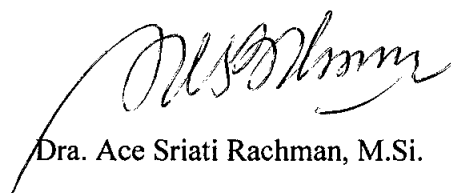
<b>Karya ilmiah</b>		
Bentuk	Judul	Tahun
Modul UT (Tim)	Menulis Naskah	1994
Modul UT (Tim)	Panduan Praktikum Menulis Naskah	1995
Modul UT (Tim)	Perencanaan Program Penyuluhan	1995
Modul UT (Tim)	Panduan Penelitian Komunikasi	1995
Modul UT (Tim)	Panduan Komunikasi Penyuluhan	1995

Modul UT (Tim)	Penelitian Komunikasi	1995
Modul UT (Tim)	Komunikasi Antar Budaya	1995
Hasil Penelitian Universitas Terbuka	Pembagian Pekerjaan Rumah Tangga pada Keluarga Ibu Bekerja dan Kuliah : Kasus pada keluarga mahasiswa Universitas Terbuka	1998
Computer assisted Instruction ( CAI)	Prinsip dasar Komunikasi yang Efektif	1999 – 2000
Hasil Penelitian Hibah Bersaing Ditjen, Depdiknas.	Model Pelatihan Pimpinan Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Pedesaan di Indonesia (Tahun ke 1) 1999	1999-2000
Hasil Penelitian	Hubungan Patron & Klien dalam jaringan sosial komunitas nelayan : Pemahaman terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan Pangandaran	2000
Hasil Penelitian	Evaluasi Penyelenggaraan Uji Coba Tutorial Tertulis Di UPBJJ Jambi, Mataram dan Banjarmasin	2000
Hasil Penelitian Hibah Bersaing DIKTI, Ditjen Depsiknas	Model Penelitian Pimpinan Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Pedesaan di Indonesia (Tahun ke II) 2001	2000-2001
Hasil Penelitian kelembagaan Universitas Terbuka	Faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian studi mahasiswa PS D3 Komunikasi Penyuluhan , UT	2001
Makalah, diseminarkan dan diterbitkan dalam Bunga Rampai FISIP – UT	Faktor-faktor yang mempengaruhi isi media massa	2003
Makalah, disampaikan pada Pelatihan Pra Jabatan Karyawan UT	Fungsi Komunikasi organisasi	2004
Makalah, diseminarkan pada Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran dan diterbitkan dalam Monograf Teknologi Pembelajaran, UT- PUSTEKOM Depdiknas	<i>Media Equation</i> dalam proses pembelajaran	2004
Tesis	Konstruksi Realitas Perempuan di Surat Kabar Nasional	2003-2004
Makalah, diseminarkan dan diterbitkan pada	Media Massa dalam pandangan paradigma Konstruktivisme	2005



Bunga Rampai FISIP UT		
Modul untuk Mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi UT(Tim)	Komunikasi Antar Budaya	2005
Modul untuk mahasiswa s1 Ilmu Komunikasi UT (Tim)	Metode Penelitian Komunikasi	2005

Yang membuat,



Dra. Ace Sriati Rachman, M.Si.

Universitas Terbuka



81497.pdf

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 JL. H. SOMAWINATA NO. 1 TIGARAKSA - TANGERANG  
 TELP. (021) 5994530 - 5994531 - 5994532 (Hunting) FAX. (021) 5990604

KODE POS 15720

Tigaraksa, 15 Mei 2007

Nomor : 423.4/10/07 - Kesbang  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

- Kepada .  
 Yth. 1. Ketua BAPEDA Kab. Tangerang  
 2. Ketua DPRD Kab. Tangerang  
 3. Kepala Kantor BPS Kab. Tangerang  
 4. Kepala BKD Kab. Tangerang  
 5. Kantor Pelayanan Satu Atap Kab. Tangerang  
 6. Badan Diklat Kab. Tangerang  
 7. Kabag BINWIL Setda Kab. Tangerang  
 8. Sdr. Camat Pamulang, Camat Serpong, dan Camat Ciputat

Di-

Tempat

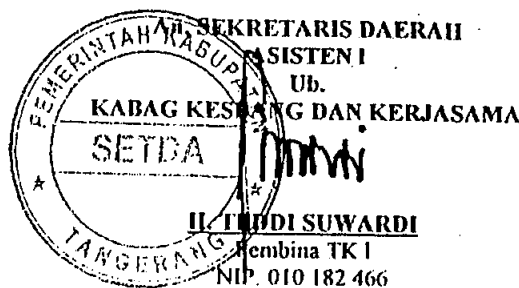
Memperhatikan Surat Pemberitahuan Penelitian Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Banten, Nomor : 070/21 -Kesbang / 2007, Tanggal 9 Mei 2007, Perihal Permohonan Ijin Penelitian atas nama :

Nama	: Milwan, S.Sos, M.Si
Alamat	: Perum Taman Sari Bukit Damai Blok A12/15 Jl. Raya Pemuda Gn. Sindur Parung Bogor.
Pekerjaan	: Peneliti
Kebangsaan	: Indonesia
Judul Penelitian	: Model Pemekaran Wilayah yang dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Bidang	: Pemerintahan
Daerah Penelitian	: Kabupaten Tangerang
Lama Penelitian	: 10 Mei s/d 10 Agustus 2007
Pengikut Peserta	: 1. Drs. Chanif Nurcholis, M.Si 2. Drs. Tijan, M.Si 3. Dra. Ace Sriati Rachman
Penanggung Jawab	: Dr. Asnah Said, M.Pd
Maksud dan Tujuan	: Menemukan model pemekaran wilayah/daerah otonom yang selaras dengan tujuan pembentukan daerah otonom yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Prinsipnya kami tidak berkeberatan untuk dilaksanakannya Kegiatan Penelitian dimaksud dengan ketentuan :

1. Maksud dan tujuan kegiatan Ijin Penelitian disesuaikan dengan surat yang sudah disampaikan,
2. Melaporkan hasilnya kepada Bupati Tangerang setelah kegiatan selesai dilaksanakan melalui Kabag Kesbang dan Kerjasama Setda Kabupaten Tangerang,
3. Pengaturan lebih lanjut kami serahkan sepenuhnya pada kebijakan Bapak.
4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan - ketentuan yang berlaku, dan menyimpang dari tujuan utama penelitian.

Demikian Ijin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati (sebagai laporan),
2. Yth. Bapak Asisten I Setda Kab. Tangerang
3. Yth. Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Banten
4. Yth. Ketua LPPM UFT Di Tangerang



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## BADAN KESBANG DAN LINMAS

Ruko Glodok Blok E9 Telp. (0254) 218785 Fax. (0254) 218786 Perumahan KSB, Serang - Banten

### SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 21 - Kesbang / 2007

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Terbuka, Tangerang, Tanggal 23 April 2007 Nomor: 6400/J31.2/PG/ 2007 Perihal Ijin Penelitian.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey;
3. Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Banten.
- Memperhatikan** : Proposal yang bersangkutan
- MEMBERITAHUKAN BAHWA**
- Nama** : Milwan, S.Sos, M.Si
- Alamat** : Prum. Taman Sari Bukit Damai Blok.A12/15 Jl.Raya Pemuda Gn.Sindur Parung Bogor
- Pekerjaan** : Peneliti
- Kebangsaan** : Indonesia
- Judul Penelitian** : Model Pemekaran Wilayah Yang Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- Bidang** : Pemerintahan
- Daerah Penelitian** : Provinsi Banten  
Kabupaten Tangerang
- Lama Penelitian** : 10 Mei s/d 10 Agustus 2007
- Pengikut Peserta** : 1. Drs.Chanif Nurcholis, M.Si  
2. Drs.Tijan, M.Si  
3. Dra.Ace Sriati Rachman
- Penanggungjawab** : Dr.Asnah Said, M.Pd.
- Maksud dan Tujuan** : Menemukan model pemekaran wilayah/daerah otonom yang selaras dengan tujuan pembentukan daerah otonom yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

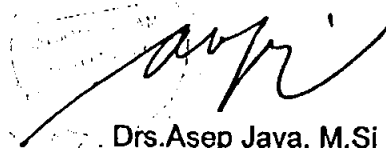
-2-

**SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:**

1. Melaporkan kedatangannya, kepada Bupati / Walikota cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat setempat dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/PKL yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud;
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Apabila masa berlakunya Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian/Survey/PKL harus diajukan kembali kepada instansi pemohon;
5. Setelah selesai melakukan Kegiatan Penelitian/Survey/PKL, agar segera melaporkan hasilnya ke Gubernur cq. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Banten;
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan : di Serang  
Pada tanggal : 9 Mei 2007

A.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
PROVINSI BANTEN  
Kepala Bidang Penanganan Konflik



Drs. Asep Jaya, M.Si  
Pembina  
NIP. 030 215 628

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Tata Praja Provinsi Banten;
3. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala BPS Provinsi Banten;
5. Yth. Sekretaris DPRD Provinsi Banten;
6. Yth. Kabag Kesbang Setda Kabupaten Tangerang;
7. Yth. Ketua LPPM UT Di Tangerang;
8. Arsip.



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN  
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
 Jl. Pemuda No. 70B, Pancoran Mas - Depok 16431, Telp. (021) 77204704

**SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN**

Nomor : 070/450 - Ksb./Kesbang & Linmas 2007

- Membaca** : Surat dari Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka Jl Cabe Raya, Ciputat Tangerang Nomor : 6400 / J31.2 / PG / 2007, Tanggal 16 Mei 2007, Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka pengembangan Program Studi.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003, Tanggal 19 November 2003, tentang Pembentukan & Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;  
 2. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 52 Tahun 2004, Tentang Rincian Organisasi Tata Kerja Kantor KESBANG & LINMAS Kota Depok.
- Mengingat** : Kegiatan yang bersangkutan tersebut diatas maka , Dengan ini Kami tidak keberatan dilakukannya Penelitian oleh ;

Nama : *Terlampir* u .

NIM/NPM. : -

Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Konsentrasi/Pmt.

Jurusan/Fakultas : Ilmu Administrasi / FISIP UT  
*Model Pemekaran Wilayah yang dapat meningkatkan*

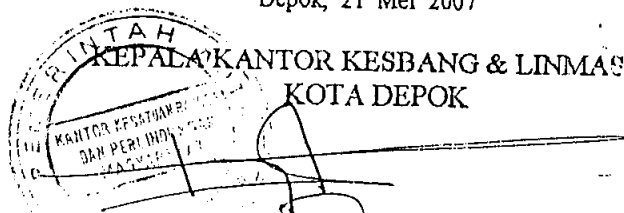
Judul Tesis/skripsi : *Dinamika Lembaga Legislatif Lokal di Kota Depok*  
*dan kesejahteraan masyarakat*

Lama : 3 (tiga) Bulan, Tgl. 21-05-2007 s/d 21-08-2007

Tempat : - Sekretariat DPRD Kota Depok  
 - Bapeda Kota Depok  
 - Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok  
 - BPS Kota Depok  
 - Kec. Se Kota Depok  
 - Kel. Se Kota Depok  
 - Polres Depok

1. Sebelum melakukan kegiatan *Penelitian/Survey/Riset/PKL Magang/Pengumpulan Data dan Observasi* yang bersangkutan harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Kantor/Bagian yang dituju, dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini ;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai /tidak ada kaitannya dengan judul penelitian/topik masalah/tujuan akademik ;
3. Apabila masa berlaku Surat pemberitahuan ini berakhir sedangkan kegiatan dimaksud belum selesai, perpanjangan Izin kegiatan harus diajukan oleh Instansi Pemohon ;
4. Sesudah selesai melakukan kegiatan, Yang bersangkutan wajib melaporkan hasilnya kepada Walikota Depok Up. Kepala Kantor KESBANG & LINMAS Kota Depok ;
5. Surat ini akan dicabut & dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan ketentuan seperti tersebut diatas ;

Depok, 21 Mei 2007



**Drs. H. ATEP HIKMAT RUSDIANA, MM.**

Pembina Tk I.

NIP. 010 114 023.

**Tembusan** : Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota (sebagai laporan) ;
2. Sekretariat DPRD Kota Depok
3. Bapeda Kota Depok
4. Dispenda Kota Depok
5. BPS Kota Depok
6. Polres Depok
7. Camat Se Kota Depok
8. Lurah se Kecamatan Perpustakaan Universitas Terbuka
9. Yang bersangkutan ;
10. Arsip.

Lampiran : Peserta Penelitian/Riset/PKL/Survey/Magang/Pengumpulan Data/Observasi dll

No.	N A M A	NPM/NIM	JURUSAN/FAK.
1.	Milwan S.Sos, M.Si ✓	132238493	Ilmu Administrasi/FISIP UT
2.	Drs. Chanif Nurcholis, M.Si	132002051	Ilmu Administrasi/FISIP UT
3.	Dra. Ace Sriati Rachman	132002052	Ilmu Administrasi/FISIP UT

Universitas Terbuka